

**ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. ITS BACK TO NATURE**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh:

NAMA : HEZDI SYAFNANDA TANJUNG
NPM : 1805170073
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 21 Juli 2022, Pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : HEZDI SYAFNANDA TANJUNG
N P M : 1805170073
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK
PENGHASILAN BADAN PADA PT. ITS BACK TO NATURE

Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

(HAHSAH, S.E., M.Si.)

Penguji II

(M. FIRZA ALPI, SE., M.Si.)

Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.)

PANITIA UJIAN

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : HEZDI SYAFNANDA TANJUNG
NPM : 1805170073
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. ITS BACK TO NATURE

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Juni 2022

Pembimbing Skripsi

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : HEZDI SYAFNANDA TANJUNG
NPM : 1805170073
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Penelitian : ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. ITS BACK TO NATURE

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang di perbaiki	05/04/22	AS
Bab 2	teori ditambahkan	12/04/22	AS
Bab 3	metode penelitian	19/04/22	AS
Bab 4	hasil perbaikan diperbaiki	18/05/22	AS
Bab 5	kesimpulan dan saran diperbaiki	14/06/22	AS
Daftar Pustaka	Daftar pustaka diperbaiki	14/06/22	AS
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Selesai Bimbingan	23/06/22	AS

Medan, 23 Juni 2022

Diketahui Oleh:

Ketua Program Studi

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Diketahui Oleh:

Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

SURAT PERNYATAAN PENELITIAN/SKRIPSI

Nama : Hezdi Syafnanda Tanjung
NPM : 1805170073
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis (Akuntansi/Perpajakan/Manajemen/Ekonomi Pembangunan)
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Menyatakan Bahwa ,

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha saya sendiri , baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian, dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi
2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut
 - Menjiplak /plagiat hasil karya penelitian orang lain
 - Merekayasa data angket, wawancara, obeservasi, atau dokumentasi.
3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti mamalsukan stempel, kop surat, atau identintas perusahaan lainnya.
4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal / Makalah/Skripsi dan Penghunjukan Dosen Pembimbing " dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.

Demikianlah Pernyataan ini saat perbuat dengan kesadaran sendiri

Medan, 23-06-2022

Pembuat Pernyataan



Hezdi Syafnanda Tanjung

(Hezdi Syafnanda Tanjung)

NB :

- Surat Pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi Pada saat Pengajuan Judul.
- Foto Copy Surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. ITS BACK TO NATURE

Hezdi Syafnanda Tanjung
Program Studi Akuntansi
Email: hezditan123@gmail.com

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penerapan tax planning atas pajak penghasilan badan pada PT. Its Back To Nature dan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak yang dilakukan oleh PT. Its Back To Nature. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisa deskriptif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dokumen dokumen tertulis perusahaan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi.

Hasil analisis laporan laba/rugi perusahaan menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Its Back To Nature dapat diperoleh manfaat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat agar perusahaan dapat menyusun anggaran kasyang lebih akurat.

Kata kunci : Tax Planning, Pajak Penghasilan Badan

ABSTRAK

ANALYSIS OF TAX PLANNING IMPLEMENTATION OF CORPORATE INCOME TAX IN PT. ITS BACK TO NATURE

Hezdi Syafnanda Tanjung
Department of Accounting
Email: hezditan123@gmail.com

This research is generally aimed at determine the implementation of tax planning on corporate income tax at PT. Its Back To Nature and to minimize the payment of the tax burden made by PT. Its Back To Nature. The analytical method used in this research is descriptive. The data analysis technique in this study used descriptive analysis techniques. The source of data used in this research is secondary data, namely data obtained by written company documents. The data collection method used in this research is a documentation study.

The results of the analysis of the company's profit/loss report indicate that the tax planning carried out by PT. Its Back To Nature benefits can be obtained by minimizing the tax burden as a cost element so that it can save cash flows out and can estimate the cash needs to pay the tax payable and determine the right payment time so that the company can prepare a more accurate cash budget.

Keywords: Tax Planning, Corporate Income Tax

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Its Back To Nature.**” Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan, baik dalam segi penyusunan materi yang belum memenuhi kesempurnaan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi mencapai kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terutama kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan karunia, rezeki, kemudahan, dan kesempatan sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan. Semoga semua ini menjadi jalan menuju ridho-Mu. Aamiin.

2. Teristimewah kepada Ayahanda Syafruddin Tanjung dan Ibunda Hesti Aswinar yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan harapan serta doa yang senantiasa mengiringi langkah kaki ini, serta dukungan moril dan materil sehingga penulis bisa membuat skripsi ini dengan baik, dan cinta kasih yang tulus serta semua hal yang diberikan kepada penulis selama ini dan tidak dapat terbayangkan sampai akhir hayat penulis.
3. Bapak Assoc Prof Dr. Agussani, M.AP Sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak H. Januri, S.E., M.M., M.Si Sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc Prof Ade Gunawan, SE, M,Si Sebagai Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si Sebagai Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Assoc Dr. Zulia Hanum, S.E, M.Si Sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Riva Ubar, SE, M.Si., Ak., CA., CPA sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

9. Ibu Assoc Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si Sebagai dosen pembimbing penulis sekaligus dosen pendamping penulis dalam ajang PIMNAS yang telah memberikan kepada penulis kepedulian yang sangat besar untuk penulis serta bimbingan, ilmu, pemikiran dan waktu kepada penulis.
10. Segenap Dosen dan Pegawai Biro Fakultas Ekonomi Dan Bisnis yang telah memberikan informasi serta kemudahan dalam mengurus proses administrasi akademik penulis.
11. Sahabat yang selalu mendukung dan membantu penulis yaitu Muhammad Falhan, Riski Dwi Sahputra, Bonari Pardomuan Pohan, Muhammad Ikhwan, Muhammad Arief, Muhammad Ihsan, kawan seperjuangan dan seluruh teman-teman B Akuntansi Pagi yang selama ini selalu memberikan dorongan dan semangat dalam proses penyusunan skripsi.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri, dan kiranya Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini di sebabkan oleh terbatasnya waktu, kemampuan, dan pengalaman yang penulis miliki. Penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan – rekan mahasiswa dan para pembaca sekalian. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan taufik dan hidayah –Nya pada kita semua serta memberikan keselamatan dunia akhirat.

Aamiin Yaa Rabbal'Alamin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Agustus 2022

Penulis,

Hezdi Syafnanda Tanjung
1805170073

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1. Perpajakan	7
A. Pengertian Perpajakan	7
B. Fungsi Pajak	9
C. Jenis Pajak	12
2.1.2 Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	14
A. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	14
B. Manfaat Perencanaan Pajak (Tax Planning).....	16
C. Karakteristik Perencanaan Pajak	17
D. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak	19
E. Motivasi Perencanaan Pajak	26
F. Aspek Formal dan Administratif Tax Planning	26

G. Bentuk - Bentuk Perencanaan Pajak	27
H. Strategi Dalam Perencanaan Pajak.....	29
I. Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak.....	29
J. Penerapan Tax Planning	32
K. Tujuan Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan	36
2.1.3 Pajak Penghasilan Badan	38
A. Pengertian Pajak Penghasilan Badan	38
B. Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan.....	39
C. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan	41
2.1.4 Pajak Penghasilan (PPh)	42
A. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)	42
B. Subjek Pajak Penghasilan (PPh).....	45
C. Objek Pajak Penghasilan (PPh).....	50
D. Objek Pajak Penghasilan Final (PPh Final)	52
E. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak	53
2.1.5 Tarif Pajak	57
2.2 Penelitian Terdahulu	60
2.3 Kerangka Berfikir.....	62
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	65
3.1 Jenis Penelitian.....	65
3.2 Definisi Operasional.....	65
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	66
3.4 Jenis dan Sumber Data	67
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	67
3.6 Teknik Analisis Data.....	67

BAB 4 HASIL PENELITIAN	69
4.1 Deskripsi Data.....	69
4.2 Analisis Data	74
BAB 5 PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	88

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	60
Tabel 3.1 Rencana Jadwal Penelitian.....	66
Tabel 4.1 Laporan Laba (Rugi)	70
Tabel 4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Rekonsiliasi fiskal	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	64
------------------------------------	----

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak (Tax) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan UU untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara sehingga pemungutannya dapat di paksakan, baik secara perseorangan maupun dalam bentuk badan usaha. Adapun yang dimaksud dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung adalah imbalan khusus yang erat hubungannya dengan pembayaran iuran tersebut.

Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen. Secara umum perencanaan merupakan proses penentuan tujuan organisasi (perusahaan) dan kemudian menyajikan strategi, tata cara pelaksanaan program, dan operasi yang di perlukan untuk mencapai tujuan perusahaan.

Tujuan utama suatu perusahaan adalah memberikan keuntungan yang maksimum untuk jangka panjang (long term return) kepada para pemodal atau pemegang saham yang telah menginvestasikan kekayaan dan mempercayakan pengelolanya kepada perusahaan. Keuntungan tersebut harus diperoleh dengan mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan

melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan perundang-undangan perpajakan.

Undang-undang perpajakan selalu mengalami perubahan dengan mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan pajak negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi dan penyempurnaan sistem administrasi.

Sudah bukan menjadi rahasia umum lagi, jika ada usaha-usaha yang dilakukan oleh wajib pajak baik itu orang pribadi maupun badan untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Bagi mereka pajak di anggap sebagai biaya, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk menguranginya. Usaha-usaha atau strategi-strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak (Tax Planning). Tujuan yang di harapkan dengan adanya tax planning ini adalah mengefesiensikan pembayaran pajak terhutang melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu, dan membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan.

Secara umum ketentuan perpajakan maupun peraturan-peraturannya yang tercantum dan diterbitkan dalam undang-undang atau peraturan-peraturan perpajakan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap dunia usaha, hal tersebut

akan meningkatkan kompetisi dan prestasi suatu badan usaha, dimana kegiatan usaha dilakukan untuk mencapai tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Upaya untuk meminimalisasi pajak sering disebut dengan teknik perencanaan pajak (tax planning) yang mengacu kepada proses merencanakan usaha dan transaksi Wajib pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dengan melakukan tax planning, perusahaan dapat mengefesiesikan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan tax planning dalam

suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU nomor 36 tahun 2008 dengan cara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Its Back To Nature menghitung, menyetor, melaporkan dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang menurut undang-undang pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atas suatu tahun pajak. Hal ini berarti Wajib Pajak bertanggung jawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT(Surat Pemberitahuan Tahunan). Melalui Surat Pemberitahuan Pajak (SPP) ke Bank Persepsi atau kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar, untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan Wajib Pajak yaitu PT. Its Back To Nature, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Penerapan sistem self assessment ini mengharuskan seorang perencana pajak untuk melakukan perencanaan pajak dengan baik. Saat ini, sistem pemungutan pajak di Indonesia makin ditingkatkan penerapannya, hal ini disamping mengganggu cashflow perusahaan juga bias berakibat kelebihan pembayaran atas pemungutan pendahuluan tersebut dimana untuk memperoleh restitusi memerlukan waktu dan biaya.

Secara umum motivasi dilakukannya perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan laba setelah pajak, karena pajak itu ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas sesuatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara menganalisis secara cermat dan memanfaatkan peluang yang ada dalam ketentuan peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama.

Penerapan tax planning cukup menguntungkan bagi perusahaan, karena dengan kondisi yang seperti ini, dapat memanfaatkan kebijakan-kebijakan perpajakan tertentu yang mungkin dapat mengurangi biaya pajak terutang

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul yaitu **“ANALISIS PENERAPAN TAX PLANNING ATAS PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT. ITS BACK TO NATURE”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan setiap tahun.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka permasalahan yang di hadapi oleh perusahaan yaitu bagaimana penerapaaan tax planning atas pajak penghasilan badan pada PT. Its Back To Nature ?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ada tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui penerapan tax planning atas pajak penghasilan badan pada PT. Its Back To Nature.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, dapat memberi tambahan informasi dan lebih menambah wawasan dan pengetahuan perihal perencanaan pajak (tax planning).
- b. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk semakin bijak dalam menerapkan tax planning dalam meminimalkan hutang pajak penghasilan.
- c. Bagi pihak lain, sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengetahui dan menambah wawasan tentang tax planning dan pajak terutang.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1. Perpajakan

A. Pengertian Perpajakan

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu, pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara.

Menurut (Rochmat Soemitro, 2011, hal.17) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Definisi pajak menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut (Zulia Hanum, 2017) Pajak merupakan sumber penerimaan terpenting bagi negara untuk membiayai pembangunan di negara ini, disamping penerimaan dari sektor migas, pemerintah telah berusaha keras untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak dengan melakukan berbagai tindakan seperti ekstensifikasi pajak, sosialisasi peraturan perpajakan dan lain sebagainya.

Menurut (Brotodiharjo, 2004, hal.4) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak dan terutang kepada penguasa tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

Menurut (Muhammad Zain, 2007, hal. 11) dapat disimpulkan bahwa ada dua hal penting yang terdapat pada pengertian pajak tersebut, yaitu :

- a. Iuran yang dapat dipaksakan, artinya iuran yang mau tidak mau harus dibayar oleh rakyat yang dikenakan kewajiban membayar iuran tersebut.

- b. Tanpa jasa timbal/kontraprestasi/imbalan langsung, yang dapat ditunjukkan mengandung arti bahwa wajib pajak yang membayar iuran kepada negara tidak ditunjukkan secara langsung imbalan apa yang diperolehnya dari pemerintah atas pembayaran iuran tersebut. Imbalan yang secara tidak langsung diperoleh wajib pajak adalah berupa pelayanan pemerintah kepada seluruh anggota masyarakat, baik yang membayar pajak maupun yang dibebaskan dari pengenaan pajak, yaitu antara lain penyelenggaraan bidang keamanan, kesejahteraan, pembuatan jalan, saluran irigasi, pencegahan penyakit menular.

B. Fungsi Pajak

Pajak didalam masyarakat mempunyai 2 fungsi utama yaitu fungsi budgeter (fungsi financial) dan fungsi regulated (fungsi mengatur).Selain itu terdapat juga fungsi distribusi dan fungsi demokrasi.

a. Fungsi Budgeter atau fungsi Financial

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyakbanyaknya kedalam kas Negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan Negara dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan

Apabila kita melihat pos-pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kita mengenal adanya dua macam penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam negeri terdiri penerimaan minyak bumi dan gas alam, dan penerimaan dari penjualan bahan baku. Penerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

b. Fungsi Regulated (Mengatur)

Fungsi regulated adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain :

1. Pemberlakuan tarif progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada Pajak Penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak, tarif pajak yang dikenakan juga semakin tinggi sehingga kebijaksanaan ini berpengaruh besar terhadap usaha pemerataan pendapatan nasional. Dalam hubungan ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam redistribusi pendapatan.
2. Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang-barang import dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industri dalam negeri.

3. Pemberian fasilitas tax-holiday atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industri tertentu dengan maksud mendorong atau memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.
4. Pengenaan pajak untuk jenis barang-barang tertentu dengan maksud agar menghambat konsumsi barang-barang tersebut diterapkan pada barang mewah sebagaimana PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) mempunyai maksud antara lain menghambat perkembangan gaya hidup mewah.

Di samping fungsi budgeter dan fungsi regulated pajak juga dapat digunakan untuk menanggulangi inflasi. Pajak di tangan pemerintah bila tepat penggunaannya merupakan alat yang ampuh untuk mengatur perekonomian Negara.

a. Fungsi Distribusi

Pajak yang dibayar masyarakat sebagai penerimaan Negara, pemanfaatannya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau oleh kelompoknya, melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Fungsi Distribusi dibagi menjadi 2 :

1. Berdasarkan sektor: Dijalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.

2. Berdasarkan wilayah: Dilakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing-masing daerah.

b. Fungsi Demokrasi

Sesuai dengan pengertian dan ciri khasnya, pajak ternyata merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan demokrasi dalam suatu Negara. Pajak berasal dari masyarakat yaitu dibayar masyarakat sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pajak juga dibuat oleh rakyat melalui wakilnya di parlemen (DPR) dalam bentuk Undang-Undang Perpajakan. Di negara kita hal yang diamanatkan dalam UUD 1945, dan amandemen, yakni pada pasal 23 ayat 2. Di situ disebutkan bahwa pajak untuk keperluan Negara disusun berdasarkan Undang-Undang. Pada akhirnya, pajak yang dipungut tersebut digunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat.

C. Jenis Pajak

Berbagai macam pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat dapat di kelompokkan berdasarkan golongan, sifat, dan instansi pemungut.

1. Pajak menurut golongan dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Pajak langsung (Direct Tax)

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat di limpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung untuk pihak bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Tidak Langsung (Indirect Tax)

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat di limpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2. Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak objektif adalah pajak yang berdasarkan obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

3. Pajak menurut pemungutnya dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin Negara dan pembangunan. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan daerah. Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan.

2.1.2 Perencanaan Pajak (Tax Planning)

A. Pengertian Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Menurut (Zain, 2003, hal. 67) Tax Planning atau perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya.

Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesiesikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) yang merupakan pembuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyeludupan pajak (tax evasion).

Menurut (Lumbantoruan, 2006, hal. 354) Perencanaan pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Menurut (Hafsah, 2020) Perencanaan pajak merupakan pengendalian setiap transaksi yang memiliki konsekuensi pajak. Kondisi tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah pajak sehingga mencapai angka minimum, yang dapat berupa penghematan pajak.

Menurut (Chairil Anwar Pohan, 2013) Tax Planning merupakan rangkaian strategi untuk mengatur akuntansi dan keuangan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan dengan cara-cara yang tidak melanggar peraturan perpajakan (in legal way). Dalam arti yang lebih luas meliputi keseluruhan fungsi manajemen perpajakan.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa tax planning adalah upaya wajib pajak untuk meminimalkan pajak yang terutang melalui skema yang memang telah jelas diatur dalam peraturan perundang-undangan perpajakan dan sifatnya tidak menimbulkan dispute antara wajib pajak dan otoritas pajak.

Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak, yaitu :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak ingin dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, buat wajib pajak merupakan resiko (tax risk) yang berbahaya dan

mengancam keberhasilan perencanaan pajak. karena itu, sebaiknya wajib pajak menghindari hal tersebut karena dapat sangat merugikan wajib pajak sendiri.

2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak yang dibuat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh (global strategy) perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek, maka perencanaan pajak yang tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian (agreement), faktur (invoice) dan juga perlakuan akuntansinya (accounting treatment).

B. Manfaat Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Tax Planning sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan Tax Planning yaitu :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefesiensikan. Pengeluaran kas untuk pembayaran biaya-biaya yang ada di perusahaan, termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai faktor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak seefisien mungkin perusahaan dapat

bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu cash flow dari perusahaan.

2. Mengatur aliran kas, karena dengan tax planning yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perusahaan berdasarkan anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
3. Menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan ontime, artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau denda yang terjadi bila terjadi keterlambatan dan atau kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
4. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

C. Karakteristik Perencanaan Pajak

Menurut (Pandapotan, 2017) Perencanaan pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya: menghitung penyusutan aktiva tetap

perusahaan dengan metode tertentu, penilaian kembali (revaluasi) aktiva tetap perusahaan, penentuan harga transfer (transfer pricing) perusahaan.

Perencanaan pajak (tax planning) yang diperkenankan menurut (Lumbantoruan, 2005, hal. 2) dapat ditempuh dengan beberapa cara sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan maksudnya adalah daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar, lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh perusahaan. Misalnya untuk pendidikan, perbaikan kantor, dll.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp.600.000.000 dapat memilih perusahaan perorangan yang akan dikenakan tariff progresif Pasal 17 dengan tarif terendah 5%. Bentuk usaha perorangan, firma dan kongsi lebih menguntungkan dari pada perseroan terbatas (PT). pajak atas penghasilan PT dikenakan dua kali, yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat menerima deviden.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha untuk memudahkan dalam mengatur penggunaan tarif pajak, potensi penghasilan yang diperoleh, kerugian yang mungkin terjadi dan aktiva yang bisa dihapus.

4. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun klasifikasi untuk kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan untuk menunda pembayaran pajak, penghasilan yang dikenakan tarif 30 % dapat dihindarkan dengan cara menunda penerimaan penghasilan pada tahun yang bersangkutan dan menggeser menjadi penghasilan pada tahun berikutnya

D. Tahapan Dalam Membuat Perencanaan Pajak

Dalam arus globalisasi dan tingkat persaingan yang semakin tajam seorang manajer dalam membuat suatu perencanaan pajak sebagaimana strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (global company strategy) juga harus memperhitungkan adanya kegiatan yang bersifat lokal maupun internasional, maka agar tax planning dapat berhasil sesuai dengan yang diharapkan, maka perencanaan itu seharusnya dilakukan melalui berbagai urutan tahap-tahap berikut:

1. Analisis Informasi (Data Base) yang ada

Tahapan pertama dari proses pembuatan tax planning adalah menganalisis komponen yang berbeda atas pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Ini hanya bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masing-masing elemen dari pajak baik secara sendiri-sendiri maupun secara total pajak yang harus dapat dirumuskan sebagai tax planning yang paling

efesien. Juga penting untuk memperhitungkan kemungkinan pengeluaran lain diluar pajak yang mungkin terjadi. Untuk itu seorang manajer perpajakan harus memperhatikan faktor-faktor baik dari segi internal maupun eksternal,yaitu:

a) Fakta yang relevan

Dalam arus globalisasi serta tingkat persaingan yang semakin kompetitif maka seorang manajer perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak untuk perusahaannya, dituntut harus benar-benar menguasai situasi yang dihadapi, baik dari segi internal maupun eksternal dan selalu dimutakhirkan dengan perubahan-perubahan yang terjadi agar tax planning dapat dilakukan secara tepat dan menyeluruh terhadap situasi maupun transaksi-transaksi yang mempunyai dampak dalam perpajakan.

b) Faktor pajak

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan tax planning adalah tidak terlepas dari dua hal yang terkait dengan faktor-faktor pajak:

- 1.Menyangkut setiap tipe perpajakan nasional yang dianut oleh suatu negara.
- 2.Sikap fiskus dalam menafsirkan peraturan perpajakan baik Undangundang domestik maupun tax treaty.

c) Faktor non pajak lainnya

Beberapa faktor bukan pajak yang relevan untuk diperhatikan dalam penyusutan suatu tax planning antara lain :

1. Masalah badan hukum

Sistem hukum yang berbeda terdiri dari berbagai tipe dari pada perusahaan. Pemilihan bentuk badan usaha yang diusulkan sering dibuat sebagai fungsi daripada seluruh peraturannya (baik untuk pajak maupun bukan pajak) dalam rangka administrasi pembentukan dan pembubarannya.

2. Masalah mata uang dan nilai tukar

Dalam ruang lingkup tax planning yang bersifat internasional masalah nilai tukar mata uang mempunyai dampak yang besar terhadap finansial satu perusahaan. Nilai tukar mata uang yang berfluktuasi atau tidak stabil memberikan resiko usaha yang cukup tinggi. Apalagi jika ada masalah devaluasi maupun revaluasi. Dari dampak finansial tentunya berakibat pada posisi laba-rugi, apalagi bila terdapat banyak transaksi baik ekspor/ impor maupun pinjaman dalam bentuk mata uang asing.

3. Masalah pengendalian devisa

Sistem pengendalian devisa yang dianut suatu negara menjadi bahan pertimbangan penting terutama jika suatu negara menganut pembahasan larangan untuk mengadakan pertukaran atau transfer dana dari transaksi internasional ataupun adanya larangan untuk meminjam uang atau menarik uang dari luar tanpa adanya ijin bank sentra/menteri keuangan. Berbagai macam aturan yang dibuat tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengusaha untuk menanamkan modalnya atau tidak, karena perhitungan labarugi akhirnya selalu menjadi patokan dasar dalam mengambil keputusan.

4. Masalah program intensif investasi

Masalah program intensif yang ditawarkan negara tertentu memberikan pilihan bagi wajib pajak untuk melakukan investasi/pemekaran usaha pada suatu lokasi negara tertentu. Insentif investasi yang merangsang bisa serupa pemberian pinjaman dengan tarif bunga rendah, bebas bunga ataupun adanya pemberian bantuan dari pemerintah.

5. Masalah faktor bukan pajak lainnya

Faktor bukan pajak lainnya seperti hukum dan sistem administrasi yang berlaku, kestabilan ekonomi dan politik, tenaga kerja, pasar, ada/tidaknya tenaga profesional, fasilitas perbankan,

iklim usaha, bahasa, sistem akuntansi, semuanya harus dipertimbangkan dalam penyusunan tax planning terutama berkaitan dengan pemilihan lokasi investasi apakah berupa cabang, subsidiary atau untuk keperluan lainnya.

2. Buat satu model atau lebih rencana besarnya pajak

Model perjanjian internasional dapat melibatkan satu atau lebih atas tindakan berikut ini :

- 1) Pemilihan bentuk transaksi operasi atau hubungan internasional.
Hampir semua perpajakan internasional paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih dahulu. Dari sudut pandang perpajakan dalam hal ini proses perencanaan tidak bisa berada diluar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi dan hubungan yang paling menguntungkan. Metode yang harus diterapkan dalam menganalisis dan membandingkan beban pajak maupun pengeluaran lainnya dari suatu proyek adalah :
 - a. Apabila tidak ada rencana pembatasan minimum pajak yang diterapkan.
 - b. Apabila ada rencana pembatasan minimum diterapkan, berhasil ataupun gagal.
- 2) Pemilihan dari negara asing sebagai tempat melakukan investasi atau menjadi residen dari negara tersebut. Dalam rencana perpajakan internasional mungkin diberi perlakuan khusus dengan

memilih antara dua atau lebih kemungkinan investasi di negara-negara berbeda.

- 3) Penggunaan satu atau lebih negara tambahan. Dalam banyak kasus, pertimbangan penghematan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh pemilihan yang hati-hati dari bentuk transaksi, operasi maupun hubungan internasional, tetapi juga oleh penggunaan satu atau lebih negara sebagai tambahan dari negara yang bersangkutan yang sudah ada dalam data base. Perencanaan pajak internasional sebetulnya merupakan perlunasan yang sederhana dari perencanaan pajak nasional. Dalam membuat model pengaturan yang paling tepat, penting sekali untuk mempertimbangkan, apakah kepemilikan dari berbagai hak, surat berharga, dan lain-lain harus dikuasakan kepada satu atau lebih perusahaan, individu, atau kombinasi dari semuanya itu
 - a. Adakah hubungan antara berbagai individu dan entitas.
 - b. Sampai saat ini oleh karena itu ini belum ditentukan lebih dahulu, dimana entitas demikian harus ditempatkan.

3. Evaluasi atas perencanaan pajak

Perencanaan pajak sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategik perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak. evaluasi tersebut meliputi :

- a) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan?
- b) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik?
- c) Bagaimana jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal?

4. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak

Hasil dari suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan. Karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

5. Memutakhirkan rencana pajak

Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, namun juga masih perlu memperhitungkan setiap perubahan yang terjadi baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya di negara dimana aktivitas tersebut dilakukan yang mungkin mempunyai dampak terhadap komponen dari suatu perjanjian, yang berkenaan dengan

perubahan yang terjadi diluar negeri atas berbagai macam pajak maupun aktifitas informasi bisnis yang tersedia sangat terbatas. Pemutakhiran dari sesuatu rencana adalah konsekuensi yang perlu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh masyarakat yang dinamis. Dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan yang akan datang maupun situasi yang terjadi saat ini, seorang manajer akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan, dan pada saat yang bersamaan mampu mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

E. Motivasi Perencanaan Pajak

Motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari 3 unsur perpajakan, yaitu :

- a. Kebijakan perpajakan
- b. Undang-undang perpajakan
- c. Administrasi perpajakan

F. Aspek Formal dan Administratif Tax Planning

Kebijakan perpajakan bermula dari implementasi undang-undang perpajakan. Oleh karena itu, ketidak patuhan terhadap undang-undang dapat dikenakan sanksi baik administrasi maupun sanksi pidana. Sanksi administrasi maupun pidana merupakan pemborosan sumber daya sehingga perlu dihindari melalui suatu perencanaan pajak yang baik.

Aspek administratif dari kewajiban perpajakan meliputi kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, membayar pajak, menyampaikan surat pemberitahuan disamping memotong atau memungut pajak. Kewajiban perpajakan berakhir pada saat pelunasan oleh wajib pajak.

G. Bentuk - Bentuk Perencanaan Pajak

Menurut (Suandy, 2003, hal. 119) menyebutkan bentuk-bentuk perencanaan pajak yang terdiri atas :

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk usaha badan hukum (legal entity) yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan jenis usaha. Bila dilihat dari perspektif perpajakan kadang pemilihan bentuk badan hukum (legal entities) bentuk perseorangan, firma dan kongsi (partnership) adalah bentuk yang lebih menguntungkan dibanding perseroan terbatas yang pemegang sahamnya perorangan atau badan tetapi kurang 25%, akan mengakibatkan pajak atas penghasilan perseroan dikenakan dua kali yakni pada saat penghasilan diperoleh oleh pihak perseroan dan pada saat penghasilan dibagikan sebagai deviden kepada pemegang saham perseorangan atau badan yang kurang dari 25%.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan. Umumnya pemerintah memberikan semacam insentif pajak/fasilitas

perpajakan khususnya untuk daerah tertentu, banyak pengurangan pajak penghasilan uang diberikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 UU No.17 tahun 2000. Disamping itu juga diberikan fasilitas seperti penyusutan dan amortisasi yang dipercepat, kompensasi kerugian yang lebih lama. Misalnya : didaerah terpencil di Indonesia bagian timur. Oleh karena daerah tersebut memiliki potensi ekonomi yang layak dikembangkan namun sulit dijangkau, maka pemerintah memberikan beberapa keringanan dalam pajak seperti izin untuk mengurangi natura dan kenikmatan (fringe benefit) dari penghasilan bruto seperti yang diatur dalam SE-29/Pj.4/1995 Tanggal 5 Juni 1995.

3. Mengambil keuntungan sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas penghasilan kena pajak yang diperbolehkan oleh UU.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (corporate company) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan antara masing-masing badan usaha (business entity). Hal ini bisa dilakukan mengingat bahwa banyak negara termasuk Indonesia mengatur bahwa pembagian deviden antar corporate (inter corporate dividend) tidak dikenakan pajak.
5. Mendirikan perusahaan yang ada sebagai profit center dan ada yang hanya berfungsi sebagai cost center. Dari hal tersebut dapat diperoleh manfaat dengan cara menyebarkan penghasilan menjadi

pendapatan dari beberapa wajib pajak didalam satu grup begitu juga terhadap biaya sehingga dapat diperoleh keuntungan atas pergeseran pajak (tax shifting) yakni menghindari tarif paling tinggi/maksimum

H. Strategi Dalam Perencanaan Pajak

1. Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif uang lebih rendah.
2. Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindar pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak.
3. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan.
4. Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN.

I. Langkah – Langkah dalam Perencanaan Pajak

Menurut (Erly Suandy, 2011, hal. 13) Dalam membuat suatu perencanaan pajak harus memperhatikan strategi perencanaan perusahaan secara keseluruhan (global company strategy) agar tax planning dapat berhasil sesuai yang diharapkan.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam perencanaan pajak adalah:

1. Menganalisis Laporan Keuangan

Tahap pertama dari proses tax planning adalah menganalisis komponen-komponen dari laporan keuangan sehingga dapat diketahui apa saja yang mempengaruhi besarnya pajak.

2. Memperkirakan Besarnya Pajak Terutang

Memperkirakan besarnya pajak terutang kemudian memahami UU yang berlaku untuk memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diperoleh dalam UU untuk dapat memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan dan sehingga dapat meminimalkan besarnya pajak terutang.

3. Melaksanakan Perencanaan Pajak

Melaksanakan perencanaan pajak dengan memanfaatkan celah-celah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak

Mengevaluasi hasil yang diperoleh dalam melakukan perencanaan pajak dengan melihat :

- a) Jika rencana tersebut tidak dilaksanakan.
- b) Jika rencana tersebut dilaksanakan dan berhasil dengan baik.
- c) Jika rencana tersebut dilaksanakan tetapi gagal.

Ketiga hal diatas pastilah memiliki hasil yang berbeda, kemudian dari hasil tersebut barulah ditentukan apakah perencanaan pajak layak untuk dilaksanakan atau tidak. Contohnya

- 1) Tidak melaksanakan perencanaan pajak, maka pajak yang ditanggung Rp.100.000.000,-
- 2) Malaksanakan perencanaan pajak dan berhasil, maka pajak yang ditanggung Rp.75.000.000,-
- 3) Melaksanakan perencanaan pajak dan gagal, maka pajak yang ditanggung Rp.125.000.000,-

Apabila melihat ketiga hasil yang dicapai, tentunya perusahaan memilih melaksanakannya perencanaan pajak karena ia bisa menghemat pajak sebesar Rp.25.000.000,- jika perencanaan pajak yang dilakukan berhasil. Karena itu dalam melaksanakan tax planning harus dilakukan dengan benar dan sesuai aturan yang berlaku, karena apabila tidak malah akan semakin merugikan perusahaan.

5. Mencari Kelemahan dan Memperbaiki Kembali Rencana Pajak

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tergantung dengan apa yang kita lakukan, dan semua itu harus sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kadang suatu rencana harus diubah mengingat adanya peraturan perundang-undangan. Tindakan perubahan tersebut harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan yang sangat kecil. Sepanjang masih besar

penghematan pajak (tax saving) yang diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan, karena bagaimanapun juga kerugian yang ditanggung merupakan kerugian minimal.

6. Memantapkan Perencanaan Pajak

Meskipun suatu rencana pajak sudah dijalankan dan proyek sudah berjalan, masih perlu mempertimbangkan setiap perubahan yang terjadi termasuk perubahan UU. Pemanfaatan suatu perencanaan pajak adalah konsekuensi yang perlu dilakukan. Dengan memperhatikan keadaan saat ini dan perkembangan-perkembangan yang mungkin terjadi, seorang manager akan mampu mengurangi akibat yang merugikan dari adanya perubahan tersebut, dan saat bersamaan dapat mengambil kesempatan untuk memperoleh manfaat yang potensial.

Dalam tax planning selain memaksimalkan fiskal, hal lain yang harus diperhatikan adalah meminimalkan biaya yang menurut UU Perpajakan tidak dapat dikurangkan menyebabkan penghasilan sebelum pajak akan lebih besar dan hal itu menyebabkan pajak terutang juga lebih besar. Oleh karena itu, dalam melakukan tax planning kita harus mengetahui biaya dikenakan sebagai pengurang dan yang tidak diperkenankan sebagai pengurang.

J. Penerapan Tax Planning

Penerapan tax planning terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak meliputi :

1. Memperbesar Biaya Penyusutan

Menurut PSAK No. 17 penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan perlu dilakukan karena manfaat yang diberikan dan nilai dari aktiva tersebut semakin berkurang. Pengurangan nilai aktiva dibebankan secara bertahap, hal ini sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus.

Berdasarkan UU PPh No.36 Tahun 2008 harta berwujud dibagi menjadi 2 golongan yaitu harta berwujud kelompok bukan bangunan dan harta berwujud kelompok bangunan. Harta berwujud kelompok bukan bangunan terdiri dari 4 kelompok yaitu kelompok 1,2,3, dan 4 sedangkan harta berwujud kelompok bangunan terdiri dari bangunan permanen dan bangunan tidak permanen. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh Nomor 36 Tahun 2008 metode penyusutan yang dapat digunakan untuk melakukan penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan adalah metode garis lurus atau metode saldo menurun. Sedangkan metode penyusutan untuk harta berwujud bangunan hanya dapat disusutkan dengan metode garis lurus.

2. Pemberian Tunjangan Tidak Dalam Bentuk Natura

Pembayaran natura maupun kenikmatan kepada pegawai pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi pegawai, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Namun demikian apabila pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan merupakan penghasilan bagi pegawai. Oleh karena itu untuk menambah biaya fiskal, perusahaan mentransformasi non deductible expense menjadi deductible expense.

Jika imbalan kepada pegawai diberikan dalam bentuk uang, maka pemberian tersebut merupakan pengurang penghasilan bruto bagi perusahaan dan bagi karyawan yang bersangkutan akan dikenakan PPh pasal 21. Sebaiknya jika imbalan yang diberikan dalam bentuk kenikmatan/natura, maka pemberian tersebut tidak termasuk pengurangan penghasilan bruto dan kepada karyawan yang bersangkutan tidak dikenakan PPh pasal 21.

3. Melakukan Perjanjian Leasing Untuk Pendanaan Aktiva Tetap

Definisi leasing menurut PSAK No.30 Tahun 2009 adalah suatu perjanjian dimana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu asset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai

imbalannya lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.

Perjanjian leasing yang dapat dimanfaatkan untuk meminimalkan pembayaran pajak adalah leasing dengan hak opsi (financial leasing). Masa leasing untuk golongan I lebih besar dari 2 tahun, golongan II & III lebih besar dari 3 tahun dan bangunan lebih besar dari 7 tahun.

Ketentuan perpajakan untuk leasing dengan hak opsi (bagi lessee) :

- 1) Tidak boleh melakukan penyusutan atas barang modal yang disewakan, sampai saat lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut. Penyusutan dilakukan mulai tahun pajak digunakan hak opsi (penyusutan capital lease merupakan non deductible expense).
- 2) Dasar penyusutan yang dipakai setelah lessee menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut adalah nilai sisa barang modal yang bersangkutan.
- 3) Pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang, kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sepanjang transaksi sewa tersebut dapat digolongkan sebagai sewa dengan hak opsi (pembayaran angsuran capital lease merupakan biaya menurut pajak kecuali pembayaran opsi/pembayaran terakhir, dibebankan sebagai cost aktiva).

- 4) Atas pembayaran sewa yang dibayarkan atau terutang oleh lessee tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. (Waluyo,2010)

4. Memaksimalkan Biaya-Biaya Fiskal

Memaksimalkan biaya-biaya fiskal adalah berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan atau dialihkan. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Contoh : perusahaan mengeluarkan sejumlah biaya untuk pendidikan karyawan dengan tujuan untuk mengurangi pendapatan kena pajak.

K. Tujuan Penerapan Tax Planning Pada Perusahaan

Tujuan penerapan tax planning pada perusahaan adalah untuk mencapai sasaran perusahaan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan cara menggunakan tax planning secara lengkap, benar dan tepat waktu yang sesuai dengan UU Perpajakan sehingga tidak terkena sanksi administratif (denda, bunga, kenaikan pajak) dan sanksi pidana. Hal tersebut bertujuan untuk efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya, guna meningkatkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba optimal.

Apabila penerapan tax planning pada perusahaan dilakukan secara baik dan benar, hal tersebut akan memberikan manfaat bagi perusahaan yang diantaranya, adalah :

- 1) Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diminimalisasi dalam proses operasional perusahaan.
- 2) Mengatur aliran kas, dengan perencanaan pajak yang dikelola secara hemat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak dan menentukan waktu pembayarannya, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.

Menurut (Horngren, 2007, hal. 67) Pajak pendapatan merupakan pengeluaran kas tunai. Pajak pendapatan dapat mempengaruhi jumlah/waktu (timing I) arus kas. Peran dasar mereka dalam penganggaran modal tidak berbeda dengan peran pembayaran kas lain. Tetapi pajak cenderung mempersempit perbedaan kas diantara proyek-proyek. Penghematan kas dalam operasi akan menyebabkan kenaikan dalam pendapatan yang terkena pajak dan dengan demikian juga menyebabkan pengecilan pengeluaran pajak.

Tax planning merupakan suatu kegiatan perencanaan laba perusahaan dengan cara memanfaatkan celah-celah perpajakan. Setelah pihak perpajakan melakukan koreksi fiskal untuk menentukan pajak terutang perusahaan yang sebenarnya, maka perusahaan dapat mengetahui besarnya angsuran pajak untuk pajak yang akan dibayar semakin kecil pada periode berikutnya.

Persahaan dapat merancang pajak penghasilan untuk periode berikutnya dengan cara memecah biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian perusahaan melakukan pengeluaran dalam bentuk biaya variabel yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan sehingga jumlah pajak yang akan dibayarkan semakin kecil, sehingga dapat meminimalisasi arus kas keluar yang harus disediakan untuk pembayaran angsuran pajak tersebut. Dengan kata lain perusahaan akan mendapat pembayaran pajak untuk periode pajak berikutnya karena jumlah angsuran pajak akan semakin kecil.

2.1.3 Pajak Penghasilan Badan

A. Pengertian Pajak Penghasilan Badan

Pada pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Badan seperti yang dimaksud dalam UU KUP.

Adapun subjek dari PPh Badan yaitu:

- a. Wajib Pajak Badan dalam negeri, yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

- b. Wajib Pajak Badan luar negeri, yaitu badan yang tidak didirikan atau tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia, dan atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia.

Menurut (Syafrida Hani, 2016) Badan usaha merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi penerimaan pajak yang cukup besar bagi penerimaan negara. Sebagai pengelola perusahaan, tentunya pihak manajemen perusahaan akan menyampaikan pertanggungjawabannya dalam suatu laporan yang disebut dengan Laporan Keuangan pada setiap akhir periode.

Adapun yang menjadi objek pajak PPh Badan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

B. Pencatatan Akuntansi Pajak Penghasilan Badan

Angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan adalah pajak penghasilan pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan setiap bulan, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 25 UU

No 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 36 tahun 2008. Jurnal untuk mencatat pembayaran PPh Pasal 25 tiap bulannya adalah sebagai berikut :

Pajak dibayar dimuka-PPh Pasal 25 xxx

Kas

xxx

Apabila pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak (pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan), maka setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi-sanksinya.

Apabila pajak yang terutang untuk satu tahun pajak ternyata lebih besar dari kredit pajak, maka kekurangan pajak yang terutang harus dilunasi sebelum SPT tahunan PPh disampaikan. Apabila tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat tanggal 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April wajib pajak badan setelah tahun pajak berakhir, sedangkan apabila tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli, maka kekurangan pajak wajib dilunasi paling lambat tanggal 30 September bagi wajib pajak orang pribadi atau 31 Oktober bagi wajib pajak badan.

Pada saat dilakukan penyetoran ke kas negara, jurnal pencatatannya adalah sebagai berikut :

Utang PPh Pasal 29 xxx

 Kas xxx

C. Saat Terutang, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan

Saat terutang dari pajak penghasilan badan adalah pada saat badan atau perusahaan tersebut sudah mendapat penghasilan atau laba. Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, PPh badan harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir (angsuran pajak).

Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu atau hari libur nasional, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Hari libur nasional termasuk hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pembayaran pajak dilakukan melalui Bank Persepsi atau bank Devisi Persepsi atau Kantor Pos Persepsi dengan sistem pembayaran secara online. Pembayaran pajak harus digunakan dengan menggunakan

Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.

Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapat validasi. SSP atau sarana administrasi lain dianggap sah apabila telah divalidasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).

Apabila pajak terutang untuk satu tahun pajak lebih besar dari jumlah kredit pajak maka penyeteroran kekurangan pajak yang terutang (pph pasal 29) harus dilunasi selambat-lambatnya sebelum SPT tahunan disampaikan. Sedangkan, untuk pelaporan SPT, maksimal disampaikan pada akhir bulan keempat setelah tahun pajak berakhir.

2.1.4 Pajak Penghasilan (PPh)

A. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak penghasilan (PPh) adalah besarnya angsuran pajak penghasilan dalam tahun pajak berjalan yang harus di bayar sendiri oleh Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan untuk setiap bulan masa dari masa pajak januari sampai dengan masa pajak desember.

Pajak penghasilan biasa disebut dengan pajak penghasilan pasal 25 atau PPh 25 adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat. Dasar hukum

untuk pajak penghasilan adalah UU Nomor 7 Tahun 1983, kemudian mengalami perubahan berturut-turut, dari mulai UU No.7 & Tahun 1991, UU No.10 & Tahun 1994, UU No.17 & Tahun 2000, dan yang terakhir UU No.36 & Tahun 2008.

Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan. Pada tahun 1932 misalnya, diberlakukan yang disebut dengan Ordonasi Pajak Pendapatan. Ordonasi pajak pendapatan ini dikenakan untuk orang Indonesia maupun orang yang bukan penduduk Indonesia tetapi memiliki pendapatan di Indonesia. Setelah itu pada tahun 1935 diberlakukan Ordonasi Pajak Upah yang mengharuskan majikan memotong gaji atau upah pegawai untuk membayar pajak atas gaji atau upah yang diterima.

Apabila dilihat dari sumber tambahan kemampuan ekonomis wajib pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yaitu :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja, misalnya gaji dan tunjangan pegawai swasta PNS dan pegawai BUMN serta penghasilan dari pekerjaan bebas (profesi).
2. Penghasilan dan keuntungan dari usaha dan kegiatan

3. Penghasilan dari modal, yang berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak, seperti bunga, deviden, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan harta dan hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, hadiah dan sebagainya.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak subjektif yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada subjek pajak lainnya. Oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum, penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting.

Menurut (Siti Resmi, 2009, hal. 88) Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak.

Menurut (Zulia Hanum, 2018) Pajak Penghasilan adalah Pajak Penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Adalah jumlah penerimaan Pajak Penghasilan.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan No.46 (2009) “Pajak Penghasilan adalah pajak dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan”.

Dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri atau luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada UU pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No.36 Tahun 2008.

B. Subjek Pajak Penghasilan Badan

Subjek pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan).

Menurut (Siti Resmi, 2013, hal.75) Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Subjek pajak pribadi yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183

hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b. Subjek pajak harta warisan belum dibagi yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.
- c. Subjek pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria :
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah, dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- d. Bentuk usaha tetap yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

Subjek pajak adalah pihak-pihak yang dikenai kewajiban untuk melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Dapat meliputi orang pribadi maupun badan (perusahaan).

a. Subjek pajak dalam negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (3) UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan , subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantungkan yang berhak.

Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pematuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli

waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris

b. Subjek pajak luar negeri

Menurut Pasal 2 Ayat (4) UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima dan memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai subjek pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan prang pribadi atau badan sebagai subjek

pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada subjek pajak luar negeri tersebut.

c. Bukan subjek pajak

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut :

1. Badan perwakilan negara asing
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

C. Objek Pajak Penghasilan Badan

Objek pajak penghasilan badan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (1) UU No.36 Tahun 2008 tentang perubahan ke 4 atas UU No.7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, yang termasuk objek pajak adalah :

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan perpajakan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honor, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan dalam UU Pajak Penghasilan.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.

- b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu atau anggota.
 - c. Keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemakaran, pemecahan atau pengambil alihan usaha.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya
 6. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 7. Deviden dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
12. Keuntungan karena selisih kursa mata uang asing
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
14. Premi asuransi
15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
16. Tambahan kekayaan neto yang berskala dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam UU yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan
19. Surplus Bank Indonesia

D. Objek Pajak PPh Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan atau pemungutan pajak penghasilan final (PPh Final) yang dipotong pihak lain maupun yang disetor sendiri bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi merupakan pelunasan PPh terutang atas

penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajiban pajaknya.

Dengan demikian maka penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan final (PPh Final) ini tidak akan dihitung atas pajak penghasilannya pada SPT Tahunan dengan penghasilan lain yang non final untuk dikenakan tarif progressif (pasal 17 UU PPh). Namun atas pelunasan pemotongan atau pembayaran PPh final tersebut juga bukan merupakan kredit pajak pada SPT Tahunan. Beberapa kategori penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan final (PPh final) adalah sebagai berikut :

- a. Bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan bangunan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

E. Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak

Penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak dan tidak dikenakan pajak penghasilan, diatur dalam Pasal 4 Ayat (3) UU No.36 Tahun 2008, yaitu :

1. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia.
2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan oleh badan keagamaan, atau badan pendidikan, atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Warisan
4. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak, wajib pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus (deemed profit) sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 UU PPh.

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa.
7. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP Dalam Negeri, Koperasi, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
 - a. Deviden berasal dari adanya laba yang ditahan, dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima deviden kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
8. Iuran yang diterima dan diperoleh dari dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal natura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut :
 - a. Merupakan perusahaan mikro,kecil,menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sector-sektor usaha yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, dan
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek Indonesia
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
13. Diterima atau diperoleh warga negara Indonesia dari wajib pajak pemberi beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal/non formal yang berstruktur baik dalam negeri maupun luar negeri.
14. Tidak mempunyai hubungan istimewa dengan pemilik, komisari, direksi atau pengurus dari wajib pajak pemberi beasiswa.
15. Komponen beasiswa terdiri dari biaya pendidikan yang dibayarkan ke sekolah, biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang di ambil, biaya untuk pembelian buku, dan biaya hidup yang wajar sesuai dengan lokasi tempat belajar.
16. Siswa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang

membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk saran dan prasarana kegiatan bidang pendidikan, penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya siswa lebih tersebut.

17. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh yang terutang, karena akan mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif PPh untuk wajib pajak adalah tarif tunggal yaitu tarif yang ditetapkan dalam pasal 17 UU No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan 25% untuk tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya. Namun wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas pajak.

Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Pengenaan tarif pajak penghasilan bersifat progresif yang artinya semakin

tinggi penghasilan yang anda terima atau peroleh, maka akan dikenakan lapis tarif yang lebih tinggi.

Adapun rincian tarif dimaksud adalah sebagai berikut :

Lapisan penghasilan kena pajak tarif :

Sampai Rp.50.000.000 = 5%

Rp.50.000.000 – Rp.250.000.000 = 15%

Rp.250.000.000 – Rp 500.000.000 = 25%

Di atas Rp. 500.000.000 = 30%

Dalam menerapkan tarif pajak, jumlah Penghasilan Kena Pajak (PKP) dibulatkan kebawah dalama ribuan rupiah penuh.

Berdasarkan tarif pajak penghasilan badan usaha ada beberapa jenis, tarif tersebut dikategorikan sesuai dengan jumlah pendapatan yang diperoleh badan usaha tersebut dalam satu tahun paja, adapun jenis tarif pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut :

- a. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto sampai 4,8 Milyar per Tahun, dikenakan tarif pajak PPh final yaitu PPh Pasal 4 ayat 2 dengan perhitungan pajak yaitu 1% dikalikan dengan seluruh pendapatan bruto dari hasil usaha perseroan, dan berdasarkan PP 46 tahun 2013 maka wajib pajak atau badan usaha wajib

menyetorkan pajak PPh tersebut setiap bulan paling lambat tanggal 15

- b. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 50 Milyar per Tahun, besarnya tarif pajak penghasilan PPh Badan dikenakan tarif pajak tunggal 25% dikalikan dengan laba bersih sebelum pajak
- c. Badan usaha yang memiliki pendapatan bruto lebih besar dari 4,8 Milyar dan kurang dari 50 Milyar per setahun, dikenakan 2 tarif perhitungan pajak dengan cara sebagai berikut : tarif sebesar 12,5% untuk pajak penghasilan yang mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto sampai dengan 4,8 Milyar), dan tarif 25% untuk pajak penghasilan yang tidak mendapatkan fasilitas (pendapatan bruto 4,8 – 50 Milyar).

Perhitungan PPh terutang berdasarkan pasal 31E dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp.4.800.000.000,- maka perhitungan PPh terutang adalah :

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{Seluruh PKP}$$

2. Jika peredaran bruto lebih dari Rp.4.800.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,- PPh terutang adalah :

50% x 25% x PKP
dari bagian peredaran
bruto yang
memperoleh fasilitas

+

25% x PKP
dari bagian peredaran
bruto yang tidak
Memperoleh fasilitas

- a. Perhitungan PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

Rp. 4.800.000.000,- x Penghasilan Kena Pajak
Peredaran Bruto

- b. PKP dari bagian bruto yang tidak memperoleh fasilitas :

Keseluruhan PKP – PKP yang memperoleh fasilitas

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Penulis	Judul	Kesimpulan
1.	Ery Marlina Mahib (2012)	Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan PPh Badan Pada PT. Matahari Yupha Prakasa	Hasil dari penelitian ini diharapkan perusahaan dapat meminimalkan pembayaran beban pajak. Sehingga pajak yang dibayar cuma sedikit. Oleh karena itu, perencanaan pajak dalam perusahaan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku.
2.	Abdul Holis (2013)	Analisis Kebijakan Perencanaan Pajak Biaya Pegawai Sebagai Upaya Untuk Meminimalkan	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21. Semua biaya yang dikeluarkan

		Beban Pajak Pada PT. PLN (Persero) Cabang Gorontalo	oleh perusahaan dapat digunakan untuk perhitungan penghasilan kena pajak untuk membayar pajak perusahaan. Oleh karena itu pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan menjadi kecil.
3.	Renita Rumuy (2013)	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT. Sinar Sasongko	Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukkan pada PT. Sinar Sasongko sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksimal.
4.	Sriana (2018)	Penerapan Tax Planning Dalam Meminimalkan Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sierad Produce Medan	Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan masukkan pada perusahaan sehingga perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak untuk mencapai laba yang maksima, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.
5.	Dewi Maliya (2018)	Analisis Tax Planning Dalam Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Pada	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya perencanaan pajak dengan Metode Gross up yang memberikan pengaruh terhadap besarnya pajak

		PT. Garuda Madju Cipta	penghasilan badan, sebelum perencanaan pajak dengan menggunakan Metode Gross up
--	--	------------------------	---

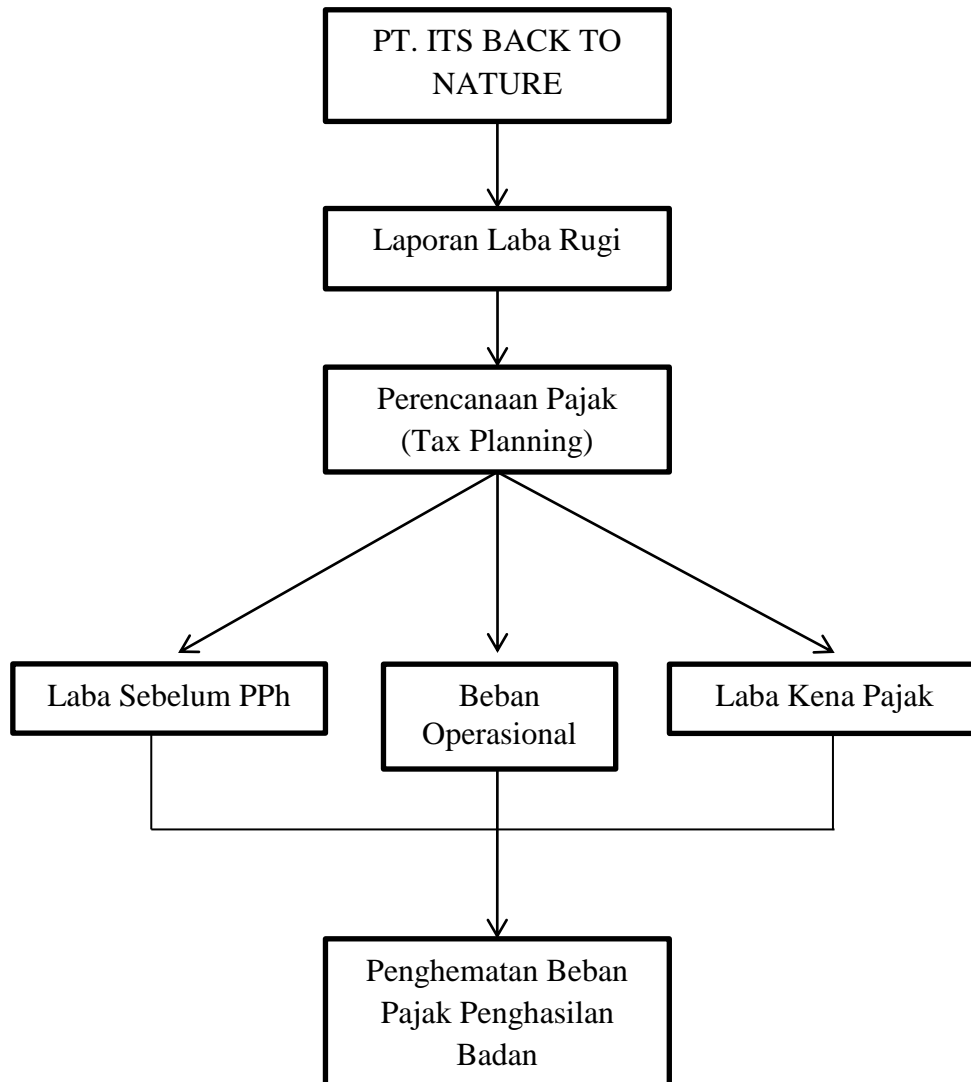
2.3 Kerangka Berfikir

Perencanaan pajak mengacu kepada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak agar utang pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Namun demikian, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat waktu sehingga dapat secara optimal menghindari pemborosan sumber daya.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Dalam sistem self assessment ini, PT. Its Back To Nature menghitung, menyetor, melaporkan dan menghitung jumlah pajak yang terutang menurut UU pada suatu masa pajak, bagian tahun pajak atau suatu tahun pajak. Hal ini berarti wajib pajak bertanggungjawab atas kewajiban perpajakan menurut peraturan perundang-undangan mulai saat pendaftaran diri sebagai wajib pajak, menghitung jumlah pajak yang terutang serta memasukkannya ke dalam Surat Pemberitahuan Pajak (SPP), kemudian menyetorkan pajak yang terutang menurut SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) melalui Surat Setoran Pajak (SSP) ke Bank Persepsi, kantor pos dan giro, dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak mendaftar untuk dilakukan perekaman data. Sehingga dalam hal ini memungkinkan wajib pajak yaitu PT. Its Back To Nature, untuk melakukan perencanaan pembayaran pajaknya sendiri (tax planning) sebagai salah satu bagian dari kebijaksanaan keuangan perusahaan.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat dari populasi (obyek) penelitian.

Menurut (Nazir, 2008, hal. 63) Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan informasi ilmiah yang sangat membantu peneliti lain yang ingin melakukan penelitian dengan menggunakan variabel yang sama. Menurut (Suharsimi Arikunto, 2010, hal. 161) variabel adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian atau penelitian.

Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah :

1. Perencanaan pajak (Tax Planning)

Pajak yang terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Tujuan perencanaan pajak adalah untuk mengefisiensikan jumlah pajak terutang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data documenter.

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi, yakni penelitian melakukan pengumpulan data yang diperoleh oleh PT. Its Back To Nature

Menurut (Umar, 2001) Data yang digunakan adalah gabungan antara data time series dan cross section. Data time series adalah sekumpulan data dari suatu fenomena tertentu yang terdapat dalam beberapa interval waktu tertentu, sedangkan data cross section adalah data untuk meneliti suatu fenomena tertentu.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan-catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait dengan lingkup penelitian ini. Data penelitian mengenai perencanaan pajak, pendapatan dan laba bersih diperoleh dari data laporan keuangan PT. Its Back To Nature.

3.6 Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan analisis deskriptif. Data yang dikumpulkan PT. Its Back To Nature dalam penelitian kemudian diolah oleh

peneliti, data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu dengan mendeskripsikan secara menyeluruh data yang didapat selama proses penelitian melalui proses perhitungan.

Menurut (Sugiyono, 2012, hal. 13) Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain.

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Menganalisis perhitungan pajak penghasilan yang telah dilakukan oleh perusahaan.
2. Membandingkan hasil perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan peraturan perpajakan.
3. Menjelaskan perbedaan perhitungan antara menurut perusahaan dengan peraturan perpajakan.
4. Memberikan kesimpulan.

BAB 4

HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Data

Laporan Laba/Rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada satu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih.

Laporan laba rugi juga merupakan gambaran atau foto bergerak yang mengidentifikasi dimensi-dimensi tertentu dari perusahaan selama periode waktu. Laporan laba rugi didasari oleh prinsip akuntansi yang disebut prinsip kecocokan.

Pendapatan biasanya dapat dengan mudah dikaitkan dengan aktivitas usaha secara secara spesifik yang berhubungan dalam periode tertentu. Setelah pendapatan untuk jangka waktu telah diidentifikasi, akuntan kemudian mencoba untuk menelisik dan mengkaitkan pendapatan dengan semua biaya yang berhubungan dengan periode waktu yang sama dan proses pembentukan pendapatan tertentu. Jumlah ini kemudian dicocokkan dengan periode tersebut. Hasilnya disebut laba bersih, jika pendapatan melebihi biaya, dan disebut rugi, jika biaya-biaya melebihi pendapatan.

Berikut adalah data laporan laba rugi PT. Its Back To Nature 2021 :

Tabel 4.1
PT. Its Back To Nature
Laporan Laba (Rugi)
Per 31 Desember 2021

KETERANGAN	31 Desember 2021
PENJUALAN	
Penjualan Ekspor	77.846.005.475
Penjualan Lokal	5.292.392.593.101
Jumlah Penjualan	5.370.238.598.576
HARGA POKOK PENJUALAN	
Persediaan awal	170.593.964.762
Biaya Tidak Langsung	374.719.824.440
Biaya Langsung	2.029.188.202.791
Biaya Penyusutan	456.562.171.393
Biaya Pengiriman ke Industri Hilir	5.749.188.316
Biaya Pengolahan di Industri Hilir	38.045.782.812
Persediaan Akhir	(231.091.234.390)
Jumlah Harga Pokok Penjualan	2.843.767.900.124
Laba Kotor	2.526.470.698.452
BIAYA USAHA	
Biaya Penjualan	139.815.957.569
Biaya Administrasi	1.070.947.136.718
Jumlah Biaya Usaha	1.210.763.094.287
Laba Usaha	1.315.707.604.165

Biaya Bunga	252.277.943.918
Laba Usaha Setelah Biaya Bunga	1.063.429.660.248
Pendapatan (Biaya) Lain-Lain	
Pendapatan Lain-Lain	170.384.253.646
Biaya Lain-Lain	(148.937.261.766)
Jlh. Pendapatan (Biaya) Lain-Lain	21.446.991.880
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.084.876.652.127
Taksiran Pajak Penghasilan	321.095.630.444
Laba setelah Pajak Penghasilan	763.781.021.683

Dari laporan Laba/Rugi PT. Its Back To Nature yang telah disajikan, peneliti membuat laporan pajak penghasilan rekonsiliasi fiskal. Laporan laba/rugi dilakukan dengan cara penjualan dikurang harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi biaya usaha untuk menghasilkan laba bersih yang belum dilakukan rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya dilakukan koreksi fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak dan pajak terutang.

Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Hal ini dilakukan untuk dapat memperoleh Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang menjadi dasar dari perhitungan pajak penghasilan.

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak Karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya Laba menurut Akuntansi (komersial) dengan menurut

perpajakan (fiskal). Laporan keuangan atau bisnis mempunyai tujuan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor privat, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk perhitungan pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip berterima umum yaitu SAK, sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (UU PPh).

Tabel 4.2
Perhitungan Pajak Penghasilan Rekonsiliasi fiskal
Per 31 Desember 2021

Pajak Tahun Berjalan	Komersial	Koreksi Positif	Koreksi Negatif	Fiskal
Laba sebelum pajak penghasilan	1.084.876.652.127			1.084.876.652.127
Beda Waktu:				
Penyusutan dan Amortisasi				
Komersial	495.089.189.485			
Fiskal	(579.038.709.157)			
Total	(83.949.519.673)			(83.949.519.672)
Penghapusan Nilai Buku Aset Tetap				
Komersial	16.273.495.186			
Fiskal	(11.148.872.484)			
Total	5.124.622.702			5.124.622.702
Biaya Gaji di TBM				
Pemulihan upah	17.305.980.462			
Fiskal	(14.295.024.923)			
Total	3.010.955.539			3.010.955.539
Penyisihan Penyertaan dan Piutang	307.559.117			307.559.117
Penghapusan Piutang	-			-
Beban Imbalan Kerja (PSAK-24)	(53.473.931.461)			(53.473.931.461)
Jumlah Beda Waktu	(128.980.313.775)			(128.980.313.775)
Beda Tetap:				
Biaya Pensiun	40.269.435.429			40.269.435.429

Sosial lainnya	23.251.559.055			23.251.559.055
Pengobatan	41.040.304.977	41.040.304.977		0
Bantuan/Sumbangan	20.295.293.717	20.295.293.717		0
Biaya CSR dan Bina Lingkungan	18.571.953.181	0		18.571.953.181
Kemalangan	7.499.515.156	7.499.515.156		0
Biaya Perjalanan Dinas dan Penginapan	9.432.594.264	0		9.432.594.264
Akomodasi Tamu	6.473.134.370	6.437.134.370		0
Pendidikan Jasmani dan Rohani	5.231.130.250	0		5.231.130.250
Pemeliharaan Rumah	2.668.537.477	0		2.668.537.477
Surat Kabar dan Majalah	2.300.519.981	2.300.519.981		0
Pelatihan dan Pendidikan	1.742.402.986	0		1.742.402.986
Denda Pajak dan penambahan Pajak	708.397.068	708.397.068		0
Biaya Lain-Lain	7.706.586.565	0		7.706.586.565
Overhead Plasma Madina	4.275.588.251	0		4.275.588.251
Bagian (Laba) Rugi Anak Perusahaan	46.413.500.414	0		46.413.500.414
Biaya jasa giro dan Deposito	(36.425.608.721)			(36.425.608.721)
Pendapatan yang telah di Kankan PPH Final	(1.950.984.604)			(1.950.984.603)
Jumlah Beda Tetap :	119.504.869.817			121.187.704.548
Jumlah Rekonsiliasi Pajak	70.524.556.041			(78.281.165.269)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	1.155.402.208.168			1.006.595.486.858
Taksiran Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	1.155.402.208.000			1.006.595.486.000

Berdasarkan perhitungan pajak penghasilan yang telah direkonsiliasi diatas, dapat dilihat bahwa perhitungan menurut fiskal terdapat taksiran penghasilan kena pajak yang berbeda dengan taksiran penghasilan kena pajak menurut perusahaan.

4.2 Analisis Data

Besarnya beban pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan setiap tahun

Pembebanan dalam koreksi fiskal terdapat perbedaan beda waktu dan perbedaan tetap.

Menurut (Ahmad Tjahyono, 2000, hal. 559) menyatakan Bahwa perbedaan yang bermanfaat tetap meliputi : penghasilan bunga bank, penghasilan deviden, biaya sumbangan termasuk zakat oleh badan amil zakat yang dibentuk atau disajikan oleh pemerintah, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak. Sedangkan menurut peraturan perpajakan tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan dibebankan pada penjualan tertentu dalam periode tertentu, biaya-biaya tersebut dapat meliputi: biaya sumbangan, biaya dalam bentuk natura, denda dan bunga pajak. sedangkan dalam perbedaan sifatnya sementara biaya penyusutan, biaya kerugian piutang.

Sebelum dilakukan koreksi fiskal, terlebih dahulu akan disajikan uraian dari masing-masing pelaksanaan koreksi fiskal yaitu sebagai berikut :

1. Biaya pengobatan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Its Back To Nature, perusahaan memasukkan biaya pengobatan sebesar Rp. 41.040.304.977 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya pengobatan menurut

undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa penggantian/imbalan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura & kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Permenkeu. Dengan demikian, biaya pengobatan yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 41.040.304.977

2. Biaya kemalangan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Its Back To Nature,, perusahaan memasukkan biaya kemalangan sebesar Rp.7.499.515.156 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya kemalangan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali, sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, biaya kemalangan yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan

sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp.7.499.515.156.

3. Bantuan/sumbangan

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Its Back To Nature,, perusahaan memasukkan biaya bantuan/sumbangan sebesar Rp. 20.295.293.717 sebagai pengurang penghasilan. Sedangkan biaya bantuan/sumbangan menurut undang-undang perpajakan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat (1) yang menyatakan bahwa harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sesuai pasal 4 ayat (3) huruf a dan b kecuali, sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i s.d m serta zakat yang diterima badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk/disahkan pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dengan demikian, biaya kemalangan yang dikeluarkan perusahaan tidak dapat diperlakukan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 20.295.293.717

4. Biaya akomodasi tamu

Pada perhitungan pajak penghasilan badan PT. Its Back To Nature,, perusahaan memasukkan biaya akomodasi tamu sebesar Rp.6.473.134.370 sebagai pengurang penghasilan, seharusnya biaya

tersebut tidak boleh masuk ke dalam pengurang penghasilan bruto. Menurut UU No. 36 Tahun 2009 pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sehingga biaya ini harus dikoreksi positif sebesar Rp. 6.473.134.370.

Perhitungan penghasilan kena pajak, pada perusahaan PT. Its Back To Nature, adalah :

Laba sebelum pajak penghasilan	Rp.1.084.876.652.127
Beda Waktu :	
Penyusutan dan Amortisasi	(Rp. 83.949.519.673)
Penghapusan Nilai Buku Aset Tetap	Rp. 5.124.622.702
Biaya Gaji di TBM	Rp. 3.010.955.539
Penyisihan Penyertaan dan Piutang	Rp. 307.559.117
Beban Imbalan Kerja (PSAK-24)	<u>(Rp. 53.473.931.461)</u>
Jumlah Beda Waktu	(Rp.128.980.313.776)

Beda Tetap :

1. Pendidikan Jasmani dan Rohani	Rp. 5.231.130.250
2. Sosial Lainnya	Rp. 23.251.559.055
3. Pemeliharaan Rumah	Rp. 2.668.537.477
4. Bantuan/Sumbangan	Rp. 20.295.293.717
5. Biaya Pensiunan	Rp. 40.269.435.429
6. Pelatihan dan Pendidikan	Rp. 1.742.402.986
7. Biaya CSR dan Bina Lingkungan	Rp. 18.571.953.181
8. Biaya Perjalanan Dinas dan Penginapan	Rp. 9.432.594.264
9. Overhead Plasma Madina	Rp. 4.275.588.251
10. Biaya Lain-lain	Rp. 7.706.586.565
11. Bunga Jasa Giro dan Deposito	(Rp. 36.425.608.721)
12. Pendapatan yang telah dikenakan PPh Final	(Rp. 1.950.984.604)
13. Bagian (Laba) Rugi anak perusahaan	<u>Rp. 46.413.500.414</u>
Jumlah Beda Tetap	Rp. 141.481.988.264
Jumlah Rekonsiliasi Pajak	(Rp. 12.501.674.488)
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	Rp.1.072.374.977.639

Taksiran Penghasilan Kena Pajak (dibulatkan)	Rp.1.072.374.977.000
Perhitungan Pajak Penghasilan Kini :	
25% x Rp.1.072.374.977.639 =	Rp. 268.093.744.409
Beban Pajak Penghasilan Kini	Rp. 268.093.744.409
Pajak dibayar dimuka :	
PPH pasal 25	Rp.183.513.795.474
PPH pasal 23	Rp. 7.882.590.009
PPH pasal 22	<u>Rp. 21.891.751</u>
Jumlah pajak dibayar dimuka	<u>(Rp. 191.418.277.234)</u>
Kurang (Lebih Bayar) PPh Badan 2021	Rp. 76.675.467.175
Laba setelah PPh Badan 2021	Rp. 804.281.232.591

Hasil suatu perencanaan pajak bisa dikatakan baik atau tidak tentunya harus dievaluasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Dengan demikian keputusan yang terbaik atas suatu perencanaan pajak harus sesuai dengan bentuk transaksi dan tujuan operasi perbandingan berbagai rencana harus dibuat sebanyak mungkin sesuai bentuk perencanaan pajak yang diinginkan. Kadang suatu rencana harus di ubah mengingat adanya perubahan peraturan perundang undangan. Walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilan sangat

kecil. Sepanjang masih besar penghematan pajak yang bisa diperoleh, rencana tersebut harus tetap dijalankan.

Keuntungan suatu wajib pajak melakukan tax planning adalah dapat memperkecil beban pajak yang harus dibayar. Dalam membuat tax planning halhal yang harus diperhatikan adalah mencari celah kelemahan UU Perpajakan (tax avoidance). Namun cara ini bukan berarti boleh melanggar aturan perpajakan tersebut. Oleh karena itu pengetahuan tentang perencanaan pajak sangat dibutuhkan oleh perusahaan.

Dari laporan Laba/Rugi PT. Its Back To Nature yang telah disajikan, peneliti membuat laporan pajak penghasilan rekonsiliasi fiskal. Laporan laba/rugi dilakukan dengan cara penjualan dikurang harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor, kemudian laba kotor dikurangi biaya usaha untuk menghasilkan laba bersih yang belum dilakukan rekonsiliasi fiskal. Selanjutnya dilakukan koreksi fiskal untuk mendapatkan laba kena pajak dan pajak terutang.

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Untuk melakukan koreksi fiskal terdapat 2 perbedaan yaitu beda tetap dan beda waktu.

- a. Beda tetap yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak boleh dikurangkan pada penghasilan kena pajak, pengeluaran yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan perusahaan dan lain-lain

- b. Beda waktu yaitu perbedaan pembebanan suatu biaya dimana jangka waktu pembebanannya berbeda.

Adapun jenis dari koreksi fiskal, yaitu :

- a. Koreksi fiskal positif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan (PPh) terutang.
- b. Koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan pajak penghasilan (PPh) terutang.

Setelah dilakukan koreksi fiskal akan di peroleh laba kena pajak, kemudian selanjutnya menghitung pajak yang harus di bayar. Dan langkah terakhir yang harus dilakukan yaitu mengurangi laba bersih sebelum koreksi fiskal dengan pajak yang harus di bayar sehingga menghasilkan laba bersih setelah pajak.

Dari perhitungan diatas dapat dilihat jumlah pajak penghasilan setelah koreksi fiskal Rp.804.281.232.591,- pajak penghasilan yang harus dibayar Rp. 76.675.467.175,- pajak penghasilan terutang yang diperoleh dari penerapan tax planning tersebut dengan memanfaatkan peraturan UU No.36 Tahun 2008. Dengan begitu penerapan tax planning menyebabkan beban pajak yang dibayarkan semakin kecil.

Ada 4 hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan Tax Planning yaitu :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefesiensikan.

2. Mengatur aliran kas, karena dengan tax planning yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas kecil lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak.
3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi.
4. Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan perpajakan, tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu. Sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Perencanaan pajak (tax planning) merupakan proses pengorganisasian yang dilakukan wajib pajak khususnya PT. Its Back To Nature dengan sedemikian rupa sehingga hutang pajak penghasilannya berada dalam posisi minimal, dimana jumlah pajak yang dibayar suatu badan kepada negara tergantung pada laba yang diperoleh, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan atas pelaksanaan perencanaan pajak pada PT. Its Back To Nature yang didukung oleh data yang diperoleh, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan melakukan perencanaan pajak bersamaan dengan berjalannya kegiatan operas. Perusahaan memahami betul tentang maksud dan tujuan dari undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dan paham dalam teori dan praktek akuntansi yang berlaku serta memahami betul praktek administrasi perpajakan. Dengan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku maka perusahaan dapat memanfaatkan celah-celah yang ada, dengan mengalihkan pengeluaran perusahaan agar diakui sebagai biaya oleh pihak pajak.

2. Perencanaan pajak berperan dalam melakukan penghematan pajak, merupakan suatu usaha memperkecil jumlah pajak yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perpajakan. Manfaat yang diperoleh oleh PT. Its Back To Nature dengan melaksanakan perencanaan pajak adalah :
 - a. Upaya wajib pajak mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pertambahan nilainya, dengan itu dapat menghemat beban pajak yang harus ditanggung perusahaan.
 - b. Perusahaan dapat mengelola transaksi yang berhubungan dengan pemberian kesejahteraan karyawan dan kualitas sumber daya karyawan melalui pemberian tunjangan dan pelatihan untuk karyawan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, penulis memberikan beberapa saran yang dianggap dapat membantu berbagai pihak yang berkepentingan dalam perencanaan pajak :

1. Perencanaan pajak yang baik berguna bagi tugas seorang manajer untuk pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang meliputi:
 - a. Berapa besar pajak yang harus dibayar.
 - b. Bagaimana caranya agar pembayaran pajak efisien.

- c. Bagaimana cara melakukan penghindaran pajak yang tidak melanggar ketentuan perpajakan.
 - d. Bagaimana hasil penghematan pajak digunakan dan untuk keperluan apa.
2. Dalam penyusunan perencanaan pajak sebaiknya perusahaan memperhatikan kesejahteraan karyawan-karyawannya karena karyawan merupakan salah satu sumber daya dan asset perusahaan yang penting dalam pencapaian tujuan perusahaan. Perusahaan memberikan biaya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Brotodiharjo, R. S. (2004). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama : Bandung
- Djuanda, dkk (2002). *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.*, Gramedia Pustaka Utama : Jakarta
- Didik, B. W. (2009). *Petunjuk Pemotongan Pajak Penghasilan 21/26 PT.* Gramedia : Jakarta
- Erly, S. (2011). *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Erly, S. (2010). *Perpajakan*, Salemba Empat : Jakarta
- Hafsah. (2020). *Analisis Penerapan Pajak Atas Biaya Kesejahteraan Karyawan.* Jurnal Pendidikan Akuntansi, Vol 3 No 3.
- Handri, R. (2013). *Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan Badan.* Jurnal Universitas Sam Ratulangi : Manado
- Hanum, Z. (2017). *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan.* Jurnal Kultura, Vol 8 No 1.
- Hanum, Z. (2018). *Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan.* Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 18 No 2
- Hani, S. (2016). *Pengaruh Tanggahan Terhadap Beban Pajak Terutang Pajak Penghasilan Badan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta).* Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol 7 No 1
- Irfan, dkk. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*, UMSU Press : Medan
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2004). *Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Per 17 Januari 2004*
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2009). *Standar Akuntansi Keuangan.* PT Salemba Empat : Jakarta
- Januri, ddk. (2015). *perpajakan Teori dan Kasus.* Perdana Publishing : Medan

- Kusnadi, ddk. (2009). *Akuntansi Keuangan (Prinsip, Prosedur dan Metode)*, Universitas Brawijaya : Malang
- Lumbantoruan & Sophar (2006). *Akuntansi Pajak* (Edisi Revisi) Grasindo : Jakarta
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi : Yogyakarta
- Ompusunggu, & Arles . (2011). *Cara Legal Siasati Pajak*. Puspa Swara : Jakarta
- Ritonga, P. (2017). *Analisis Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Dan Revaluasi Asset Tetap Untuk Meminimalkan Beban Pajak Pada PT. Taspen (Persero) Cabang Utama Medan*. Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis, Vol 17 No 1
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan*. Gramedia : Jakarta
- Purwono, & Herry. (2010). *Dasar – Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Penerbit Erlangga : Jakarta
- Renita, R. (2013). *Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Paja pada PT. Sinar Sasongko*, STIE MDP : Palembang
- Resmi, & Siti .(2013). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat : Jakarta
- Soemitro, & Rochmat. (2011). *Asas Dan Dasar Perpajakan*. Rafika Aditama : Bandung
- Suharsini, & Arikunto. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi) Rineka Cipta : Jakarta
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan Kesepuluh. Alfabeta : Bandung
- Siti, K. R. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*. Graha Ilmu Yogyakarta : Yogyakarta
- Undang – Undang Pajak Lengkap Tahun. (2010). Mitra Wacana Media : Jakarta
- Waluyo (2013). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta
- Zain, & Mohammad (2007). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat : Jakarta

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. DATA PRIBADI

Nama : Hezdi Syafnanda Tanjung
NPM : 18051700873
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 21 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak Ke : 1 dari 1 bersaudara
Alamat : Jl. Patra Komp Deli Raya 169 LK I
No. Telp : 0895611279164
Email : hezditan123@gmail.com

2. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Syafruddin Tanjung
Pekerjaan : Pensiunan TNI AL
Nama Ibu : Hesti Aswinar
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Patra Komp Deli Raya 169 LK I

3. DATA PENDIDIKAN FORMAL

1. TK Sofa Marwah 2004-2006
2. SD Negeri 067253 Tahun 2006-2012
3. SMP Swasta Dr. Wahiddin Sudirohusodo Medan Tahun 2012-2015
4. SMA Swasta Dharma Wangsa Medan Tahun 2015-2018
5. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2018-2022



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 2339 /KET/IL.3-AU/UMSU/F/2022

Bismillahirrahmanirrahim

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menerangkan nama-nama mahasiswa yang terlampir bahwa sebagai Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bebas tugas akhir/skripsi berdasarkan surat keputusan rektor nomor : 1728/KEP/IL.3-AU/UMSU/F/2021 tentang Ketentuan Pembebasan Tugas Akhir/Skripsi bagi Mahasiswa Lolos ke Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) tahun 2021.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dipergunakan seperlunya, dan agar yang berkepentingan mengetahui.

Medan, 14 Dzulkaidah 1443 H

14 Juni 2022 M

A.n. Rektor

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

dan Alumni,



Assoc. Prof. Dr. Rudianto, M.Si.

NIP. 197702012005011001



Tembusan :

1. Bapak Rektor UMSU sebagai laporan;
2. Bapak Wakil Rektor Se-UMSU;
3. Pimpinan Fakultas ;
4. BAAD ;
5. Pertinggal.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjabar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESERTA MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA (UMSU)

Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Lampiran :

Nama-Nama Mahasiswa Yang Lolos PIMNAS dan Bebas Skripsi Per-Fakultas 2021

No	Nama	NPM	Fakultas	Prodi
1	Hasbi Assiddiq	1905170236	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
2	Adrian Bagas	1905170244	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
3	Sitta Hazzar Eka Romadhon	1905170237	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
4	Dodo Wiranda	1904290059	Pertanian	Agroteknologi
5	Riski Dwi Sahputra	1805170081	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
6	Muhammad Falhan	1805170083	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
7	Bonari Pardomuan Pohan	1805170060	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
8	Hezdi Syafnanda Tanjung	1805170073	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
9	Arya Alfandi	1805160364	Ekonomi dan Bisnis	Manajemen
10	Asprizal Rizky	1805170149	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
11	Nur Annisa Putri Br Sembiring	1805170317	Ekonomi dan Bisnis	Akuntansi
12	Yusril Fahriansyah	1804290036	Pertanian	Agroteknologi
13	Mhd. Indra Husada	1804290079	Pertanian	Agroteknologi



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003

Website : www.umsu.ac.id E-mail : kampus@rektor.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Nomor : 1728 /KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021

Tentang

KETENTUAN PEMBEBASAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI
BAGI MAHASISWA LOLOS KE PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL (PIMNAS)
SERTA BERPRESTASI PADA KEWIRAUSAHAAN MAHASISWA INDONESIA (KMI)
DAN PERUSAHAAN PEMULA BERBASIS TEKNOLOGI (PPBT)

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara :

Menimbang : a. Bahwa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merasa perlu untuk meningkatkan prestasi, karya dan kreativitas mahasiswa sebagai inspirasi dan motivasi di dunia pendidikan.
b. Bahwa perlu untuk memberikan apresiasi, pengakuan dan penghargaan kepada mahasiswa yang berprestasi dalam kompetisi karya ilmiah berupa pembebasan dari tugas akhir/skripsi.
c. Bahwa sehubungan dengan point a dan b tersebut diatas, maka dipandang perlu dibuat Surat Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
5. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 84/KEP/I.0/D/2018 tanggal 06 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Tahun 2018-2022;
6. Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 053/KEP/I.3/D/2013;

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tanggal 05 April 2021.
2. Meningkatnya peran mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam menyumbangkan penghargaan karya ilmiah bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Pembebasan Tugas Akhir/Skripsi Bagi Mahasiswa Lolos Ke PIMNAS Serta Berprestasi pada KMI dan PPBT.**

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : kampus@rektor.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

3. Wakil Rektor III adalah pejabat Universitas dibawah Rektor yang diberi kewenangan mengelola bidang kemahasiswaan
4. Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Pasal 2
TUJUAN

Pembebasan tugas akhir / skripsi ini bertujuan untuk :

1. Memberi penghargaan kepada mahasiswa yang lolos ke Pimnas, KMI dan PPBT.
2. Memberi motivasi kepada mahasiswa untuk lebih meningkatkan kualitas dirinya dalam penulisan karya ilmiah.

Pasal 3
PERSYARATAN UMUM

1. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang lolos ke Pimnas.
2. Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang memperoleh prestasi serta didanai pada KMI dan PPBT
3. Untuk mendapatkan penghargaan ini, disyaratkan melampirkan transkrip nilai yang telah disahkan dengan IPK minimal 3.10 (tiga koma satu nol)
4. Topik karya ilmiah disesuaikan dengan bidang keilmuan mahasiswa.
5. Mahasiswa yang dinyatakan terpilih dan lolos sebagai peserta PIMNAS untuk semua kategorin : PKM PE-PSH (Penelitan Eksakta-Sosial Humaniora), PKM K (Kewirausahaan), PKM-M (Pengabdian Masyarakat), PKM-KC (Karsa Cipta), PKM-T (Teknologi) dan PKM-GT (Gagasan Tertulis)

Pasal 4
PERSYARATAN KHUSUS

1. Karya tulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) disetarakan dengan Penulisan Tugas Akhir pada masing-masing Program Studi.
2. Bagi mahasiswa yang memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (4) dan telah ditetapkan sebagai peserta PIMNAS, KMI dan PPBT berhak mendapatkan penghargaan berupa Pembebasan dari kewajiban Penulisan tugas akhir/skripsi pada masing-masing Program Studi.

Pasal 5
KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan sebagai amanat dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dianggap perlu.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal : 23 Sya'ban 1442 H
06 April 2021 M



Rektor
Prof. Dr. Agussani, M.AP.



Tembusan :

1. Pimpinan Universitas
2. Dekan Se-UMSU
3. Biro Se-UMSU
4. Arsip



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(UMSU)

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Baeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6619056 - 6622400 - 6624567 Fax. (061) 6625474, 6631003
Website : www.umsu.ac.id E-mail : kampus@rektor.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Lampiran : SK Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Nomor : 1728/KEP/II.3-AU/UMSU/F/2021
Tanggal : 23 Sya'ban 1442 H / 6 April 2021
Tentang : Ketetapan Pembebasan Tugas Akhir/Skripsi Bagi Mahasiswa Yang Lolos Pimnas, KMI dan PPBT

PETUNJUK TEKNIS
KETENTUAN PEMBEBASAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI
BAGI MAHASISWA LOLOS KE PIMNAS SERTA BERPRESTASI PADA KMI DAN PPBT

1. Mahasiswa menulis laporan Penelitian yang lolos ke PIMNAS serta berprestasi pada KMI dan PPBT berdasarkan panduan penulisan skripsi setiap Program Studi disetiap Fakultas
2. Dosen pendamping mahasiswa yang lolos ke PIMNAS serta berprestasi pada KMI dan PPBT adalah dosen pembimbing penulisan laporan hasil kegiatan PKM, KMI dan PPBT. Jika Mahasiswa tersebut lintas Prodi/Fakultas, maka diserahkan kepada Program Studi/Fakultas untuk menentukan dosen pembimbing mahasiswa tersebut.
3. Dosen pendamping berhak mengganti judul Penelitian Mahasiswa atau menambahkan variable di judul PKM disesuaikan dengan program studi mahasiswa yang lolos PIMNAS serta berprestasi pada KMI dan PPBT.
4. Dosen pendamping wajib memeriksa kelengkapan isi laporan hasil penelitian dan dokumen lampiran kemudian diverifikasi oleh PUSKIIBI dan SRCC Universitas.
5. Mahasiswa wajib membawah laporan proposal skripsi dengan melampirkan seluruh kegiatan Penelitian Mahasiswa. (Laporan akhir, log book, poster, artikel ilmiah yang belum/sudah publikasi, Sertifikat HKI (Jika ada), sertifikat PIMNAS, piagam penghargaan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) dan melaporkannya kepada ketua atau sekretaris prodi diketahui oleh pimpinan fakultas.
6. Berita acara bimbingan proposal dan bimbingan skripsi diisi berdasarkan hasil bimbingan pada saat melaksanakan kegiatan penelitian dan ditandatangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang ada di Prodi dan Fakultas masing-masing
7. Lembar pengesahan proposal dan tugas akhir/skripsi tetap ditanda tangani oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan yang ada di Prodi dan Fakultas masing-masing.
8. Mahasiswa menyerahkan bukti berupa laporan hasil Penelitian yang lolos ke PIMNAS, KMI dan PPBT kepada Dosen Pendamping, Program Studi, dan Fakultas masing-masing.
9. Mahasiswa yang lolos ke PIMNAS serta berprestasi pada KMI dan PPBT mendapatkan nilai akhir A serta tidak diikutsertakan dalam pengujian seminar proposal dan sidang meja hijau.
10. Kewajiban pembayaran SPP tidak dibebankan setelah berita acara kelulusan penyesuaian sidang meja hijau dibacakan oleh pejabat yang berwenang di Prodi dan Fakultas.
11. Mahasiswa yang telah menyerahkan laporan hasil penelitian yang lolos ke PIMNAS serta berprestasi pada KMI dan PPBT berhak melengkapi persyaratan wisuda.

Ditetapkan di Medan
Pada Tanggal 23 Sya'ban 1442 H
06 April 2021 M





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**LAPORAN AKHIR
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA**

**ITS Back To Nature
(Inovasi Tinta Spidol dalam pemanfaatan bahan alami sebagai bahan dasar)**

**BIDANG KEGIATAN
PKM - KEWIRAUSAHAAN**

Diusulkan oleh:

Riski Dwi Sahputra	1805170081	2018
Muhammad Falhan	1805170083	2018
Bonari Pardomuan Pohan	1805170060	2018
Hezdi Syafnanda Tanjung	1805170073	2018

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

RINGKASAN

Tinta spidol merupakan alat pelengkap dari penggunaan spidol itu sendiri, dimana jika spidol ingin digunakan maka membutuhkan tinta sebagai cairan yang keluar. Biasanya tinta spidol menggunakan bahan kimia sebagai bahan utamanya, namun kami hadir dengan memanfaatkan bahan alami sebagai bahan pembuatan tinta spidol. Adapun bahan alami yang kami gunakan sebagai bahan dasar pembuatan produk ini adalah daun jambu biji dan serbuk arang tempurung kelapa. Berdasarkan survei yang kami lakukan melalui google Formulir menunjukkan adanya ketertarikan jika produk ini dijual dipasaran, respon positif inilah menunjukkan adanya peluang dari bisnis ini yang sangat baik. Kemudian kami memilih daun jambu biji untuk bahan pembuatan tinta ini karena selain mudah didapat dan berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa daun jambu biji juga mengandung antosianin dan tanin yang mana kedua unsur ini bisa dijadikan sebagai pengental dalam tinta spidol tersebut (Desiana, 2016).

Kata Kunci : Tinta Spido, Alami, Tempurung Kelapa, Daun Jambu Biji

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Survei Pasar	2
1.2 Kompetitor.....	2
1.3 Keunggulan Komoditas	2
1.4 Target Luaran	3
BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA	3
2.1 Deskripsi Produk	3
2.1 Peluang Usaha	3
2.3 Pemasaran atau Promosi.....	4
2.4 Analisis BEP.....	4
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	5
3.1 Aspek Produksi.....	6
3.2 Aspek Manajemen Usaha	7
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI PENGEMBANGAN USAHA	8
BAB 5. PENUTUP	10
5.1 Kesimpulan.....	10
5.2 Saran	10
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN.....	11
Lampiran 1. Justifikasi Anggaran.....	11
Lampiran 2. Dokumentasi Bimbingan dan Diskusi Online	12
Lampiran 3. Dokumentasi Pembelian Peralatan	14
Lampiran 4. Dokumentasi Survey Bahan Baku	19
Lampiran 5. Dokumentasi Pembuatan Tinta ITS Back To Nature	21
Lampiran 6. Dokumentasi Pengemasan Tinta ITS Back To Nature	23
Lampiran 7. Desain Brosur.....	25
Lampiran 8. Video Animasi	25
Lampiran 9. Penjualan Online.....	26
Lampiran 10. Dokumentasi Promosi Ke Sekolah – Sekolah	27
Lampiran 11. Dokumentasi Promosi Ke Toko ATK	28
Lampiran 12. Surat Keterangan Pengurusan HKI.....	29
Lampiran 13. Dokumentasi Penjualan Juli – September	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo Produk.....	3
Gambar 3.1 Managerial Usaha ITS Back To Nature	6
Gambar 3.2 Proses pembuatan tinta ITS Back To Nature	7

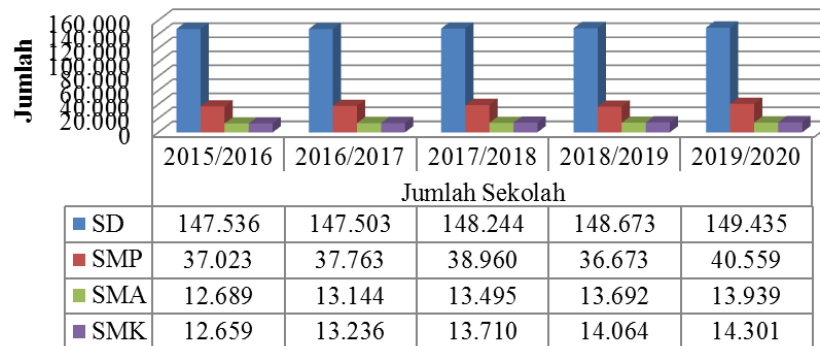
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Analisis SWOT	4
Tabel 2.2 Biaya Variabel.....	5
Tabel 4.1 Hasil Luaran Yang Dicapai.....	8
Tabel 4.2 Pendapatan Penjualan Produk ITS Back To Nature	9

BAB 1. PENDAHULUAN

Terciptanya produk tinta ITS Back To Nature kami dikarenakan adanya beberapa hal yaitu karena adanya peluang dan karena adanya ketersediaan bahan baku yang mendukung untuk keberlangsungan usaha. Peluang ini kami lihat dan amati melalui data badan pusat statistik yang menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah pertumbuhan sekolah berdasarkan jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK.

Jumlah Pertumbuhan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun Ajaran 2015/2016 dan 2019/2020



Sumber : BPS Indonesia

Dengan data 5 tahun belakangan ini yang menunjukkan peningkatan pada setiap tahunnya maka kami menganalisa mengenai peluang terhadap penggunaan spidol yang akan meningkat; dengan meningkatnya penggunaan spidol maka kebutuhan akan tinta spidol juga akan meningkat pula. Hal ini dikarenakan keduanya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan.

Alasan lain terciptanya produk ini karena adanya ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan yaitu daun jambu biji dan tempurung kelapa. Seperti kita tahu bahwa indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis sehingga tumbuhan jambu biji dengan mudah tumbuh di lingkungan sekitar kita (Wijaya, 2020).

Selain itu berdasarkan penelitian sebelumnya bahwa daun jambu biji juga mengandung *antosianin* dan *tanin* yang mana kedua unsur ini bisa dijadikan sebagai pengental dalam tinta spidol tersebut (Desiana, 2016). Bahan baku yang kedua adalah tempurung kelapa. Seperti kita tahu juga indonesia merupakan negara yang kaya akan kuliner dimana penggunaan buah kelapa sangat banyak digunakan untuk pembuatan berbagai jenis masakan (Ariningsih, 2021).

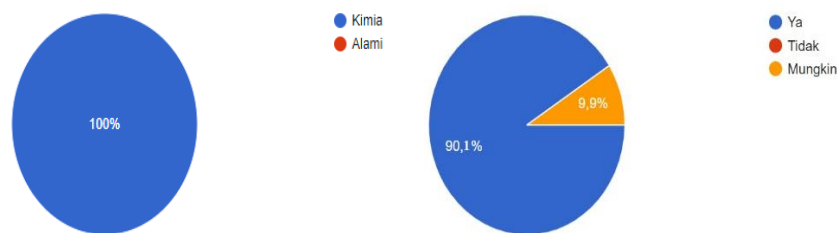
Banyaknya kebutuhan kelapa dalam dunia kuliner maka kami mengolah limbah tempurung kelapanya menjadi zat pewarna alami yang terlebih dahulu kami bakar dan jadikan serbuk berwarna hitam. Kedua bahan inilah yang menjadi latar belakang terciptanya produk inovasi tinta spidol berbahan dasar alami yang kami beri nama ITS Back To Nature (Inovasi Tinta Spidol dalam pemanfaatan bahan alami sebagai bahan dasar).

Berikut merupakan gambaran mengenai analisis keberlangsungan usaha mulai dari survei pasar, kompetitor dan keunggulan dari produk itu sendiri :

1.1 Survei Pasar

Sebelum melakukan pembuatan produk ini kami melakukan survei pasar untuk memastikan bahwa produk ini akan laku di pasaran dengan harapan agar keberadaannya mampu bersaing dengan produk lain. Dikarenakan situasi pandemik, kami melakukan survei pasar secara online dengan menggunakan Google Formulir dan berikut linknya :

<https://docs.google.com/forms/d/1oBE4susY7r6dZwZV-0gN0y7T-Y4kIMkdNI-dDjVNqSs>



Pada survei pasar yang dilakukan ini dengan 102 responden, kami memperoleh hasil 100% dari pengguna spidol menggunakan tinta spidol (bukan permanen) yang berasal dari campuran bahan kimia dan 90,1% dari responden tersebut sangat tertarik, sedangkan 9,9% nya menyatakan mungkin untuk membeli produk ITS Back To Nature jika produk ini ada dan dijual dipasaran dengan berbagai alasan yang menyatakan produk ini berbahan dasar alami sehingga baik digunakan. Dari survei tersebut menunjukkan bahwa terdapatnya peluang jika produk ini hadir di pasaran.

1.2 Kompetitor

Dalam membangun usaha tentunya terdapat Kompetitor oleh karena itu kami melakukan pengecekan untuk melihat kompetitor yang akan dihadapi nantinya. Florix dan Snowman merupakan dua produk yang sama dengan menjual tinta spidol untuk papan tulis atau bersifat tidak permanen. Dari kedua produk tersebut kami melihat bahwa produk ITS Back To Nature mampu bersaing dan belum ada dipasaran karena tinta ITS Back To Nature menggunakan Daun Jambu Biji dan tempurung kelapa sebagai bahan dasar.

1.3 Keunggulan Komoditas

Keunggulan komoditas yang kami buat dari kompetitor yang ada adalah bahan dasar yang kami gunakan merupakan berasal dari bahan alami, bahan baku mudah di dapat, tidak memiliki bau, harga lebih murah dari kompetitor, dan minim resiko jika digunakan jangka panjang. sedangkan kompetitor menggunakan bahan kimia walau ada juga yang menggunakan bahan alami namun memiliki perbedaan pada bahan bakunya.

Komoditas ini dibuat juga dengan mempertahankan kualitas dan komponen-komponen yang di campur di dalamnya sehingga produk ini akan secara terus-menerus dilakukan pengukuran dan peningkatan kualitas dari produk itu sendiri.

Selain itu dengan hadirnya komoditas produk ini maka dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar dimana lingkungan sekitar dapat dijadikan peran dalam perekrutan tenaga kerja usaha ini. Dengan manfaat ini Secara tidak langsung dapat meningkatkan ekonomi pada lingkungan sekitar serta dapat mengurangi pengangguran yang ada disekitar lingkungan usaha.

1.4 Target Luaran

Adapun untuk target luaran pada program ini kami telah menghasilkan berupa :

1. Laporan Kemajuan.
2. Laporan Akhir.
3. Produk ITS Back To Nature (tinta spidol bahan alami).
4. Artikel Ilmiah.
5. Video Animasi.

BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

2.1 Deskripsi Produk

Tinta ITS Back To Nature merupakan jenis tinta isi ulang spidol yang digunakan pada media papan tulis/white Board dimana produk ini berasal dari bahan alami yang ramah lingkungan dan tidak berbau. Berikut branding yang masukkan pada produk dengan logo produk berikut:



Gambar 2.1 Logo Produk

Produk Tinta Spidol Daun Jambu Biji dengan Tempurung Kelapa merupakan produk usaha yang belum ada dipasaran sehingga produk ini memiliki prospek yang menjanjikan bagi masyarakat atau petani jambu biji. Oleh karena itu peluang usaha untuk produk Tinta Spidol Daun Jambu Biji Dengan Tempurung Kelapa cukup tinggi peluang usahanya.

2.1 Peluang Usaha

Berdasarkan produk ini maka terdapat peluang usaha yang dapat diklasifikasikan antara lain:

Tabel 2.1 Analisis SWOT

Analisis	Usaha ITS Back To Nature (Inovasi Tinta Spidol dalam pemanfaatan bahan alami sebagai bahan dasar)
Strength	1. Berbahan dasar alami (Non-kimia) 2. Bahan baku mudah didapat 3. Harga lebih murah dibandingkan produk sejenis 4. Tidak berbahaya bagi kesehatan terutama saluran pernafasan
Weakness	1. Pemasaran masih belum mampu mendukung perkembangan produk 2. Merupakan produk baru dan belum dikenal oleh masyarakat secara luas
Opportunity	1. Banyaknya konsumen yang menggunakan produk tinta spidol terutama di dunia pendidikan dan perkantoran 2. Konsumen lebih memilih produk yang mengandung zat yang aman dan sehat
Threat	1. Adanya produk sejenis yang dijual dipasaran 2. Kurang dikenal masyarakat luas

2.3 Pemasaran atau Promosi

Adapun promosi yang kami lakukan pada kegiatan ini dalam menunjang penjualan produk Tinta ITS Back To Nature yang sesuai target adalah sebagai berikut:

1. Media sosial ITS Back To Nature seperti *Instagram*, *facebook*, *shopee*, dan *whatsapp*.
2. Melakukan kegiatan promosi dengan melakukan penawaran toko Alat Tulis Kantor di seputaran kota medan.
3. Melakukan promosi di berbagai sekolah yang ada di seputaran kota medan dan serdang bedagai.
4. Promosi kepada masyarakat di lingkungan sekitar yang kira-kira membutuhkan tinta spidol dengan melihat profesi dari masyarakat itu sendiri.

2.4 Analisis BEP

Berikut analisis harga pokok produksi dan BEP (Break Even Point) pada produk ITS Back To Nature:

Tabel 2.2 Biaya Variabel

NO	BAHAN-BAHAN	HARGA	HARGA PER SATUAN
----	-------------	-------	------------------

1	Daun Jambu Biji	Rp.17.000/ Goni/500 buah	Rp. 34
2	Tempurung Kelapa	Rp.20.000/ Goni/ 500 buah	Rp. 20
3	Tepung Maizena	Rp. 4.000/ Kotak/ 250 buah	Rp. 16
4	Cuka	Rp. 4.000/ Botol/ 25 buah	Rp. 160
5	CMC	Rp.60.000/500 Gram/ 250 buah	Rp. 240
6	Tas Goody bag	Rp. 2.000/ buah	Rp. 2.000
7	Botol Tinta	Rp. 1.200/ buah	Rp. 1.200
8	Sedotan tinta	Rp. 1.500/ buah	Rp. 1.500
9	Stiker	Rp. 2.000/ buah	Rp. 2.000
10	Plastik Packing	Rp. 300/ buah	Rp. 300
TOTAL			Rp. 7.470

$$\begin{aligned}
 \text{Laba} &= \text{Harga Jual} - \text{Harga Beli} \\
 &= \text{Rp } 12.000 - \text{Rp } 7.470 \\
 &= \text{Rp } 4.530
 \end{aligned}$$

Analisis BEP:

$$\begin{aligned}
 \text{Fixed Cost} &= \text{Rp. } 500.000 \\
 \text{Price} &= \text{Rp. } 12.000/ \text{ unit} \\
 \text{Variabel Cost} &= \text{Rp } 7.470/ \text{ unit}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{BEP unit} &= \frac{\text{biaya tetap}}{\text{harga jual per unit} - \text{biaya variabel per unit}} \\
 &= \frac{500.000}{12.000 - 7.470} = \mathbf{111 \text{ botol}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{BEP rupiah} &= \frac{\text{biaya tetap}}{1 - \frac{\text{biaya variabel per unit}}{\text{harga jual per unit}}} \\
 &= \frac{500.000}{1 - \frac{7.470}{12.000}} = \mathbf{\text{Rp. } 1.324.503}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Pembuktian} &= \text{unit BEP} \quad \times \quad \text{Harga jual per unit} \\
 &= 111 \quad \times \quad 12.000 \\
 &= \text{Rp. } 1.320.000 \quad (\text{Hasil selisih dikarenakan} \\
 &\quad \text{pembulatan})
 \end{aligned}$$

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Dalam metode pelaksanaan yang kami lakukan dalam kegiatan ini adalah dengan tiga sistem yaitu metode *virtual-digital*, *online* dan *offline*. Metode pelaksanaan ini, kami pakai dikarenakan saat ini dalam keadaan covid-19. Walaupun kami di tengah pandemik ini ada melaksanakan kegiatan offline namun

kami tetap menjaga kesehatan dengan selalu memperhatikan protokol kesehatan yang ketat antara satu dan lainnya.

Untuk mencapai seluruh kegiatan ini maka kami membagi tugas terhadap pengorganisasian usaha. Pengorganisasian ini sangat penting sehingga menimbulkan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ini baik itu pada aspek produksi maupun pada aspek manajemen usaha. Berikut susunan organisasi dalam pelaksanaan produk ini :

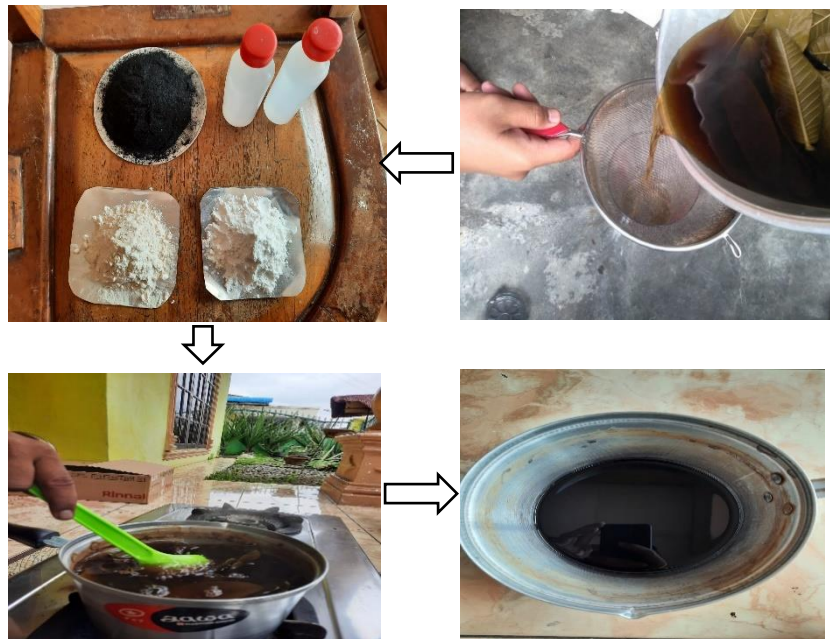


Gambar 3.1 Managerial Usaha ITS Back To Nature

3.1 Aspek Produksi

Dalam aspek produksi ini kami melakukan kegiatan produksi produk Tinta ITS Back To Nature dengan dengan menerapkan beberapa langkah yaitu: 1) Carilah daun jambu biji, kemudian cuci dan rebus daun jambu biji sampai warna airnya berubah menjadi coklat pekat. 2) Kemudian saring air rebusan daun jambu biji. Setelah itu sisikan air rebusan sebanyak 100 ml. 3) Campurkanlah bahan - bahan seperti, tempurung kelapa, tepung maizena, cuka dan CMC. 4) Setelah itu campurkan seluruh bahan diatas, kemudian dimasak kembali hingga mengental.





Gambar 3.2 Proses pembuatan tinta ITS Back To Nature

Tahapan-tahapan proses produksi tinta ITS Back To Nature dimulai dari pencucian daun jambu biji hingga bersih, setelah itu dilakukan perebusan dengan kadar air yang telah diukur. Tahap yang kedua adalah setelah mendidih air rebusan daun jambu biji dilakukan penyaringan. Pada tahap ketiga setelah dilakukan penyaringan maka dilakukan pencampuran antara seluruh bahan-bahan yaitu: serbuk tempurung kelapa bakar, cuka, CMC, dan tepung maizena menjadi satu. Tahap keempat seluruh bahan yang telah dilakukan pencampuran setelah itu dilakukan pemasakan kembali hingga mengental dan produk selesai.

3.2 Aspek Manajemen Usaha

Dalam kegiatan ini kami melakukan berbagai evaluasi dimana bertujuan untuk memperbaiki kinerja dan menyesuaikan kegiatan dengan ketercapaian rencana-rencana yang telah kami buat. Dengan demikian seluruh kegiatan dapat terkendali pada porosnya mulai dari kegiatan produksi, pemasaran, hingga penjualan berlangsung.

Pada aspek manajemen usaha ini kami melaksanakan kegiatan yang sebelumnya kami rancang hingga kami melakukannya secara langsung. Kegiatan ini dimulai dari kegiatan produksi hingga penjualan. Seluruh kegiatan ini kami lakukan dengan 3 metode yaitu virtual-digital, online, dan offline. Ketiga metode ini kami terapkan dalam aspek manajemen usaha ini. Kegiatan yang direncanakan sebelumnya kami telah melaksanakannya secara blended dari ketiga metode tersebut. Dimana kami melakukan promosi dengan cara online seperti membuat akun Instagram, Shopee, dan Whatsapp. Untuk kegiatan offlinenya kami lakukan dengan bertemu langsung dengan konsumen untuk menawarkan produk tinta ITS Back To Nature kami secara langsung seperti toko alat tulis kantor di sekitar tempat produksi produk yaitu di Jl Pertiwi, dan berbagai sekolah-sekolah di


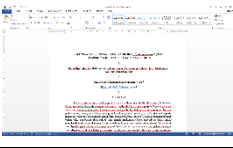

seputaran kota medan mengenai kebijakan harga kami menetapkan harga sebesar Rp 12.000/botol, dengan isi 100ml.

Selain itu di sela-sela promosi dan penjualan produk kami melakukan kebijakan potongan harga atau diskon kepada pelanggan yang melakukan pembelian dalam jumlah yang banyak, kebijakan ini diharapkan dapat menjadi daya tarik pelanggan dalam membeli produk tinta ITS Back To Nature yang kami buat dimana produk kami ini juga memiliki kelebihan yang berasal dari bahan alami yang dapat menjadi pertimbangan bagai dampak yang dirasakan.

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI PENGEMBANGAN USAHA

Ketercapaian target tidak lepas dari hasil luaran yang sudah diperoleh dari keseluruhan kegiatan yang sudah terlaksana baik dan presentase yang menunjukkan 100% mulai dari aspek produksi sampai evaluasi. Berikut hasil luaran yang telah tercapai: berikut luaran yang berhasil kami capai :

Tabel 4.1 Hasil Luaran Yang Dicapai

Target Luaran	Gambaran	Persentase Hasil yang Dicapai
1. Laporan Kemajuan		100%
2. Laporan Akhir		100%
3. Produk ITS Back To Nature		100%
4. Artikel Ilmiah		100%
5. Video Animasi	 https://youtu.be/c7WB7-XbnMk	100%

Dalam aspek produksi, tim telah melakukan 2 kali produksi. Pada produksi pertama, tim memproduksi sebanyak 100 botol tinta dan telah terjual sebanyak 75 botol tinta. Pada produksi kedua, memproduksi sebanyak 100 botol tinta dan telah terjual sebanyak 83 botol tinta.

Pada aspek pemasaran, pertama tim telah mematok harga tinta yang sudah dipertimbangkan dengan banyaknya biaya keseluruhan produksi sehingga diperoleh harga Rp. 12.000/100 ml botol tinta. Kedua, tim melakukan promosi secara online (melalui media sosial dan juga marketplace seperti shopee) dan juga melakukan promosi di sekitar tempat produksi, ke sekolah-sekolah, ke bimbingan – bimbingan belajar, dan juga toko alat tulis kantor. Ketiga, tim melakukan kerja sama dengan SMK Negeri 1 Pantai Cermin, SMP Negeri 1 Pantai Cermin , SD,SMP,SMA IRA dimana tim sebagai supplier tinta untuk kebutuhan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut.

Tabel 4.2 Pendapatan Penjualan Produk ITS Back To Nature

No	Konsumen	Banyaknya yang terjual	Harga	Jumlah
1	SD Surya Bahagia	10 botol tinta	Rp. 12.000	Rp. 120.000
2	SMP Negeri 1 Pantai Cermin	35 botol tinta		Rp. 420.000
3	SD,SMP,SMA IRA	15 botol tinta		Rp. 180.000
4	SMK Negeri 1 Pantai Cermin	35 botol tinta		Rp. 420.000
5	FAMILY FOTOCOPY	15 botol tinta		Rp. 180.000
6	Menteng Foto	20 botol tinta		Rp. 240.000
7	Online	3 botol tinta		Rp. 36.000
8	Masyarakat Umum	8 botol tinta		Rp. 96.000
9	Bimbel Al Misbah	9 Botol tinta		Rp. 108.000
10	Bimbel Miss Tampubolon	8 botol tinta		Rp. 96.000
Jumlah Penjualan		158 botol tinta		Rp. 1.896.000
Harga pokok penjualan (Rp 7.470 x 158 btl)				Rp. 1.180.260
Laba				Rp. 715.740

Keberlanjutan usaha yang akan dilakukan tim akan menyebarluaskan produk di daerah Sumatera Utara dan membuat produk inovasi tinta berwarna seperti warna merah dan biru, tidak hanya warna hitam saja.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tinta ITS Back To Nature merupakan jenis tinta isi ulang spidol yang digunakan pada media papan tulis/white Board dimana produk ini berasal dari bahan alami yang ramah lingkungan dan tidak berbau. Produk ini memiliki prospek peluang yang besar untuk kedepannya dimana tinta spidol sangat dibutuhkan jika penggunaan tinta spidol yang banyak pula. Tinta ITS Back To Nature ini memiliki kelebihan dimana bahan yang kami gunakan dalam pembuatan tinta spidol ini adalah bahan alami yang ramah lingkungan yaitu daun jambu biji dan tempurung kelapa.

5.2 Saran

Berdasarkan dari seluruh kegiatan yang sudah terlaksana maka saran untuk tim kami adalah terus melakukan evaluasi-evaluasi dan perbaikan terhadap seluruh aspek yang masih mengalami hambatan terutama pada aspek pemasaran dan penjualan dengan melakukan berbagai strategi hingga mencapai target penjualan yang diinginkan. Dalam saran ini juga tim harus berinovasi produk dengan warna yang lebih bervariasi serta melakukan kegiatan promosi/pemasaran dengan maksimal lagi.

DAFTAR PUSTAKA

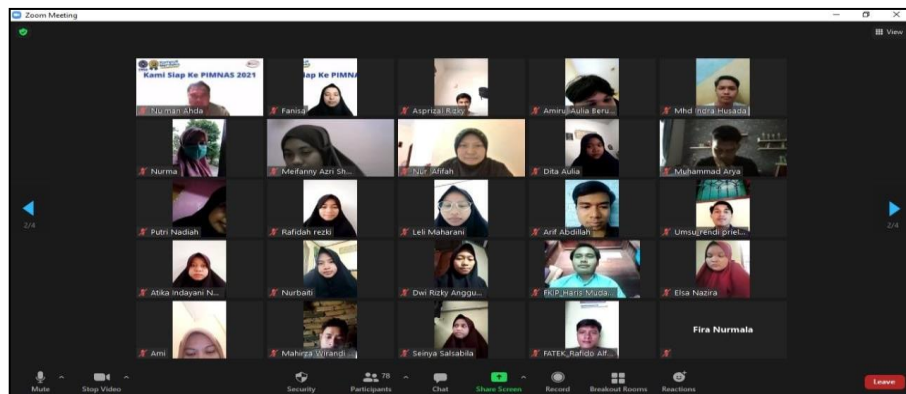
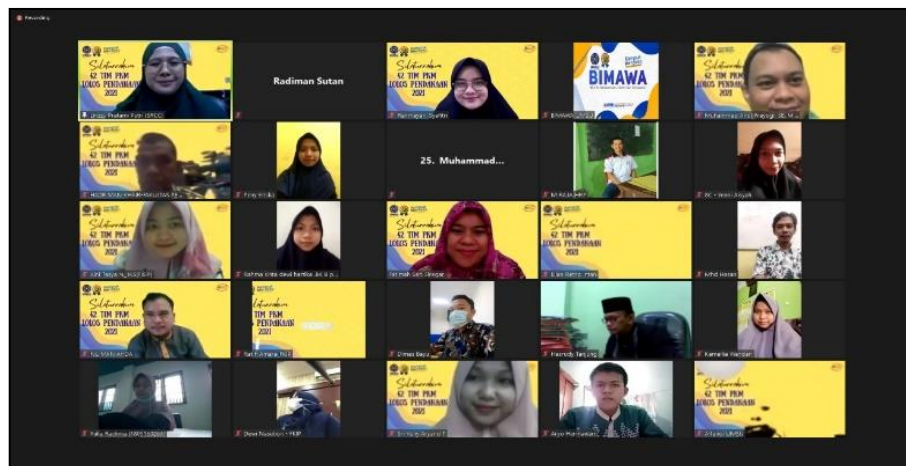
- Ariningsih, S., Hasrini, R. F., & Khoiriyah, A. (2021, February). Analisis Produk Santan Untuk Pengembangan Standar Nasional Produk Santan Indonesia. In *Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi* (Vol. 2020, pp. 231-238). Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. 2016-2020. *Jumlah Pertumbuhan Sekolah Di Indonesia Berdasarkan Jenjang Pendidikan*. Medan : Badan Pusat Statistik
- Desiyana, Lydia Septa. 2016. *Uji Efektivitas Sediaan Gel Fraksi Etil Asetat Daun Jambu Biji (Psidium guajava Linn) Terhadap Penyembuhan Luka Terbuka Pada Mencit (Mus musculus)*. Universitas Syiah Kuala Darussalam – Banda Aceh, Jurnal Natural Vol. 16 No.2, 2016 ISSN 1141-8513
- Wijaya, D. S. (2020). Rebusan Daun Jambu Biji Terhadap Kadar Glukosa Darah. *Journal of Holistic and Traditional Medicine*, 4(04), 426-431.

LAMPIRAN**Lampiran 1. Justifikasi Anggaran**

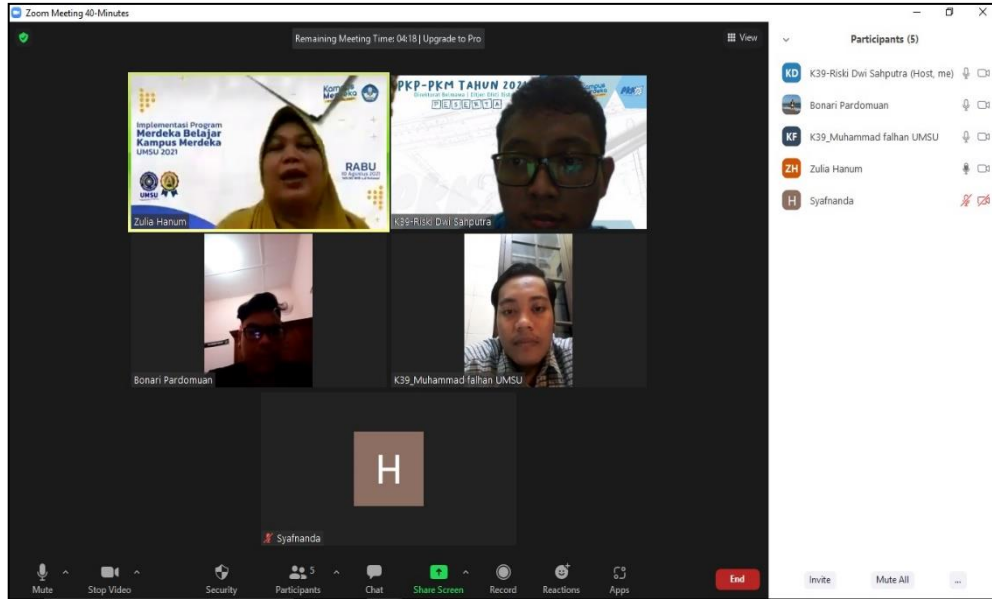
No	Keterangan	Jumlah	Harga	Debet (Rp)	Kredit (Rp)
	PENDANAAN DIKTI (100%)			Rp8.700.000	
	PENGELUARAN				
1	perlengkapan dan peralatan				
	panci	3	Rp 55.000		Rp 165.000
	sendok masak	5	Rp 28.500		Rp 142.500
	mangkuk	4	Rp 5.000		Rp 20.000
	serbet	4	Rp 7.500		Rp 30.000
	gelas ukur	2	Rp 34.000		Rp 68.000
	kompur gas	1	Rp 345.000		Rp 345.000
	timbangan digital	1	Rp 165.000		Rp 165.000
	saringan	3	Rp 22.000		Rp 66.000
	mesin penghalus	1	Rp1.150.000		Rp1.150.000
	tabung kas	1	Rp565.000		Rp 565.000
2	bahan habis pakai				
	botol tinta	500	Rp 1.200		Rp 600.000
	sedotan tinta	500	Rp 1.500		Rp 750.000
	cmc	5 Kotak	Rp 37.000/ 500 gr		Rp 185.000
	cuka	20 btl	Rp 4.000		Rp 80.000
	tepung maizena	20 kotak	Rp 4.000		Rp 80.000
	daun jambu biji	1 Goni	Rp 17.000		Rp 17.000
	tempurung kelapa	1 goni	Rp 20.000		Rp 20.000
	plastik wrapping	3	Rp 45.500		Rp 136.500
	goody bag	42 lusin	Rp 14.500		Rp 609.000
	stiker produk	500 buah	Rp 2.000		Rp 1.000.000
3	transportasi				
	biaya pencarian peralatan				Rp 127.328
	biaya parkir/adm				Rp 10.000
	biaya pencarian bahan				Rp 128.542
	biaya perjalanan 1				Rp 122.000
	biaya perjalanan 2				Rp 130.322
	biaya survei				Rp 131.369

	perjalanan bahan baku				
	biaya perjalanan survei 2 bahan baku				Rp 125.000
	ongkos kirim				Rp 325.380
4	kuota internet	2 bln	Rp 296.000		Rp 592.000
	Jasa pembuatan video animasi	1	Rp 350.000		Rp 350.000
	Cetak brosur	500 buah	Rp 500.000		Rp 500.000
	Total Pengeluaran Biaya (100%)				Rp 8.735.941

Lampiran 2. Dokumentasi Bimbingan dan Diskusi Online







Lampiran 3. Dokumentasi Pembelian Peralatan

Medan tgl. 7/6/2021
 Kepada : _____

FAKTUR/BON/KONTAN/ TY No **100425**

Banyaknya	NAMA BARANG	@	Jumlah
3	Panci	Rp 55.000	Rp 165.000
5	Sandak kaosok	Rp 28.000	Rp 142.500
4	Mangkok	Rp 5.000	Rp 20.000
4	Sarbat	Rp 7.500	Rp 30.000
2	gelas ukur	Rp 33.000	Rp 66.000
1	Kompor Gas + semang	Rp 345.000	Rp 345.000
1	Timbangan Digital	Rp 165.000	Rp 165.000
3	Sampiran	Rp 22.000	Rp 66.000
TANDA TERIMA			JUMLAH Rp. 1.001.500

TOKO : ANTO GAS Medan tgl 9 Juni 2021
 Kepada : _____

FAKTUR / BON / KONTAN No.

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
	Tabung Gas 12 kg + Isi	1	565.000

Tanda terima _____

Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan!

Jumlah : Rp. 565.000

<p>PERTAMINA 11.261182 SPBU PERTAMINA JL. PUTRI MERAK JINGGA NO.184 Shift: 1 No. Trans: 1564935 Waktu: 11/06/2021 09 : 04 : 02</p> <p>Pulau/Pompa : 1 Nama Produk : PERTAMAX Harga/Liter : Rp. 9.200 Volume : (L) 5.434 Total Harga : Rp. 50.000 Operator : SARI</p> <p>CASH 50.000</p> <p>TERIMA KASIH SELALU MENGGUNAKAN MASKER</p>	<p>PERTAMINA 11.261182 SPBU PERTAMINA JL. PUTRI MERAK JINGGA NO.184 Shift: 1 No. Trans: 1564936 Waktu: 11/06/2021 09 : 06 : 42</p> <p>Pulau/Pompa : 1 Nama Produk : PERTAMAX Harga/Liter : Rp. 9.200 Volume : (L) 3.478 Total Harga : Rp. 32.000 Operator : SARI</p> <p>CASH 32.000</p> <p>TERIMA KASIH SELALU MENGGUNAKAN MASKER</p>	<p>PERTAMINA 11.261182 SPBU PERTAMINA JL. PUTRI MERAK JINGGA NO.184 Shift: 1 No. Trans: 1564937 Waktu: 11/06/2021 09 : 07 : 11</p> <p>Pulau/Pompa : 1 Nama Produk : PERTAMAX Harga/Liter : Rp. 9.200 Volume : (L) 4.347 Total Harga : Rp. 40.000 Operator : SARI</p> <p>CASH 40.000</p> <p>TERIMA KASIH SELALU MENGGUNAKAN MASKER</p>
--	--	--

SARI JAYA tgl 11 - 06 - 2021
 <JL. BANDUNG NO 103> Kepada : _____

FAKTUR / BON / KONTAN No.

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
500 bh	BOTOL 100 ML	Rp 1200	Rp 600.000
500 bh	Sedotan Tawar	Rp 1.500	Rp 750.000

Tanda terima _____


Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan!

Jumlah : Rp. 1.350.000

Jun. 17 12:12-Paket Anda telah diterima. Jika Anda belum menerima pesanan, kami sarankan...

hezdi syafnanda tanjung 0895611279164
 Jl. Patra No.152, Titi Papan, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara, Sumatera Utara, Kota Medan, Medan Deli

PIYAN BILAH...

 PLASTIK WRAPPING PACKINGAN PLASTIK WRAP STRETCH FILM 10CM X 250M
 Warna:PUTIH BENING TRANSPARAN
 Tidak Ada Garansi
Rp35.000 Qty:3

PENGEMBALIAN SAYA TULIS ULASAN

Chat Seller

Nomor Pesanan 627414708273627 Copy
 Dipesan pada 24 Jun 2021 16:26:06
 Dibayar pada 28 Jun 2021 12:12:47

Subtotal(3 Barang)	Rp105.000
Biaya Pengiriman	Rp32.000
Total:	Rp137.000

TOKO : ANTO GAS Medan tgl 9 Juni 2021
 Kepada :

FAKTUR / BON / KONTAN No.

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
	Tabung Gas 12 kg + Isi	1	565.000
Tanda terima			Jumlah : Rp. 565.000

Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan!

TOKO KING'S Medan 9 Juni 2021
 Jl Medan City - Tudi Toko

NOTA NO.

BANYAKNYA	NAMA BARANG	HARGA @	JUMLAH
1	Mesin Penghalus		1.150.000
Tanda Terima			Jumlah Rp. 1.150.000

Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan!

Hormat Kami,



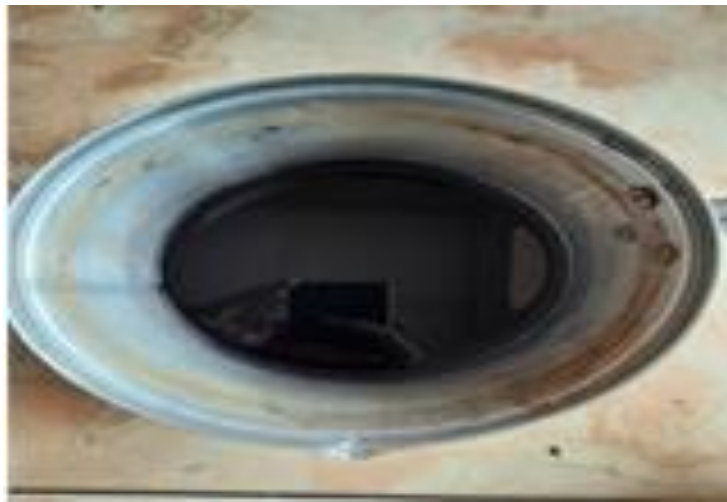


Lampiran 4. Dokumentasi Survey Bahan Baku





Lampiran 5. Dokumentasi Pembuatan Tinta ITS Back To Nature



Lampiran 6. Dokumentasi Pengemasan Tinta ITS Back To Nature

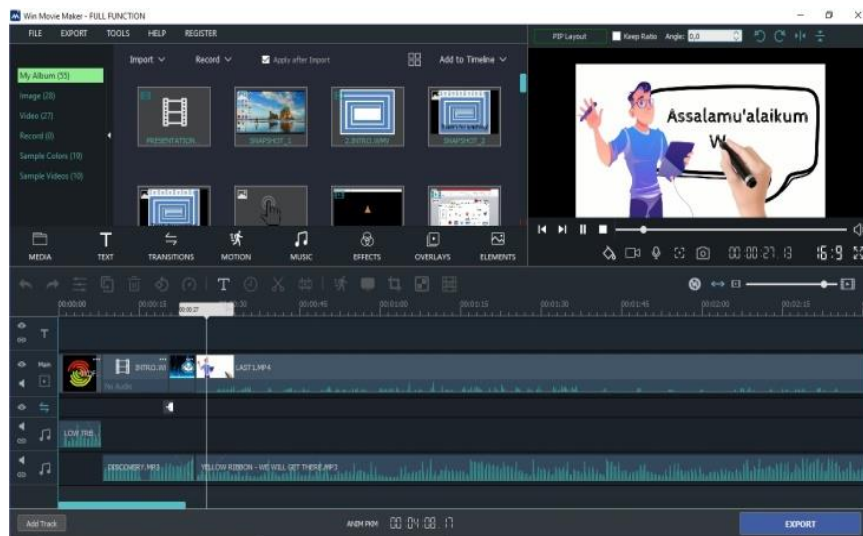




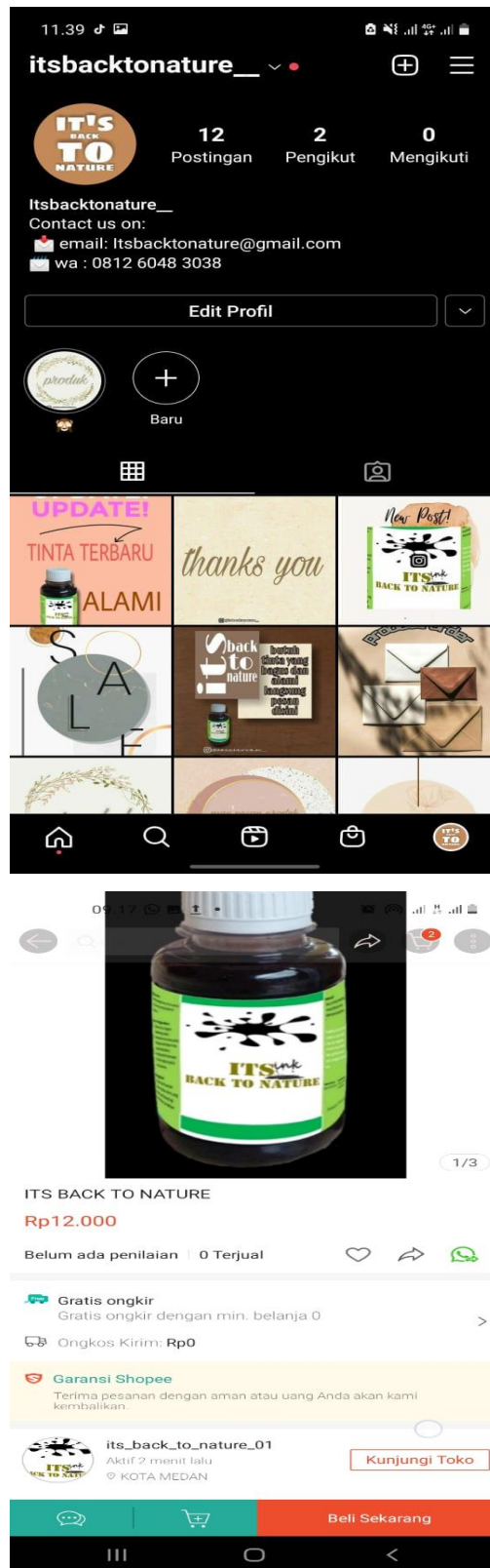
Lampiran 7. Desain Brosur



Lampiran 8. Video Animasi



Lampiran 9. Penjualan Online



Link :

<https://shopee.co.id/product/515589429/11432525828?smtt=0.515609008-1630808121.3>

Lampiran 10. Dokumentasi Promosi Ke Sekolah – Sekolah





Lampiran 11. Dokumentasi Promosi Ke Toko ATK



ITS^{ink}
BACK TO NATURE

Medan tgl. 20 Juli 20.21

Jl Pertiwi Gg Kenanga No. 2
Medan Tembung
No. HP : 0812-6048-3038

Kepada : Family Foto Copy

FAKTUR / BON / KONTAN NO.

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
12	Tinta ITS Back to Nature	12000	144000
			}
Tanda terima			Jumlah : Rp. 144000

Barang² yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan !

ITS^{ink}
BACK TO NATURE

Medan tgl. 23 Juli 20.21

Jl Pertiwi Gg Kenanga No. 2
Medan Tembung
No. HP : 0812-6048-3038

Kepada : Family Foto Copy

FAKTUR / BON / KONTAN NO.

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
3	ITS Back To Nature	12000	36000
			}
Tanda terima			Jumlah : Rp.

Barang² yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan !

Penjualan Bulan Agustus

ITS^{ink}
BACK TO NATURE

Pebauran tgl. 3 Agustus 20.21

Jl Pertiwi Gg Kenanga No. 2
Medan Tembung
No. HP : 0812-6048-3038

Kepada : SMP Negeri 1 Pantai
Cermin

FAKTUR / BON / KONTAN NO.

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
35	Tinta ITS Back to Nature	12.000	420000
			}
Tanda terima			Jumlah : Rp. 420000

Barang² yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan !

ITS^{ink}
BACK TO NATURE

Jl Pertiwi Gg Kenanga No. 2
Medan Tembung
No. HP : 0812-6048-3038

Persembahkan tgl 10 Agustus 2021
Kepada : SMK Negeri 1
Pantai Cermin

FAKTUR / BON / KONTAN NO.

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
35	Tinta ITS Back To Nature	12000	420000
			}
Tanda terima			Jumlah : Rp. 420 000

Barang² yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan !

ITS^{ink}
BACK TO NATURE

Jl Pertiwi Gg Kenanga No. 2
Medan Tembung
No. HP : 0812-6048-3038

Medan tgl 13 Agustus 2021
Kepada : SD Surya Bahagia

FAKTUR / BON / KONTAN NO.

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
10	Tinta ITS Back To Nature	12000	120000
			}
Tanda terima			Jumlah : Rp. 120 000

Barang² yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan !

ITS^{ink}
BACK TO NATURE

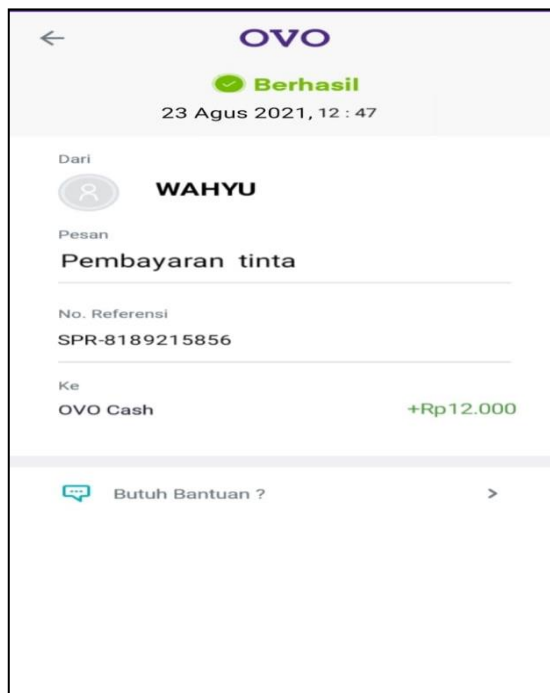
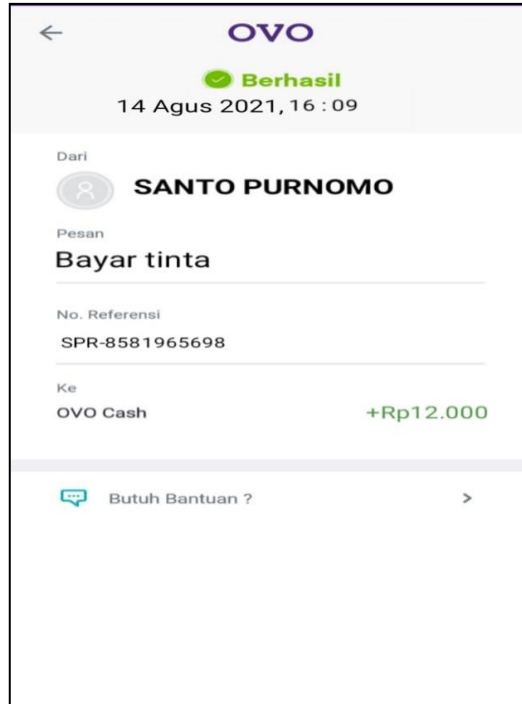
Jl Pertiwi Gg Kenanga No. 2
Medan Tembung
No. HP : 0812-6048-3038

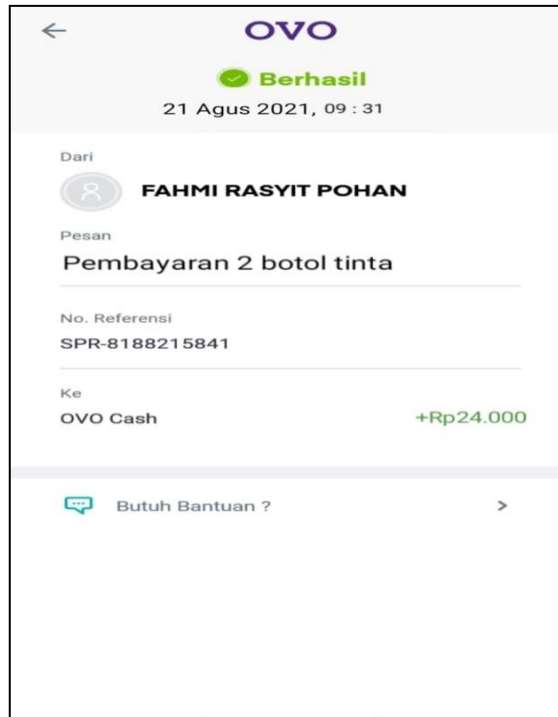
Medan tgl 21 Agustus 2021
Kepada : SD / SMP / SMA
IRA

FAKTUR / BON / KONTAN NO.

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
15	Tinta ITS Back To Nature	12000	180000
			}
Tanda terima			Jumlah : Rp. 180 000

Barang² yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan !





Penjualan Bulan September

Banyaknya	Nama Barang	@	Jumlah harga
0	Tinta ITS Back To Nature	12-cw	96-cw
Tanda terima			Jumlah : Rp. 96-cw







ITS^{ink}
BACK TO NATURE
 Jl Pertiwi Gg Kenanga No. 2
 Medan Tembung
 No. HP : 0812-6048-3038
FAKTUR / BON / KONTAN NO.


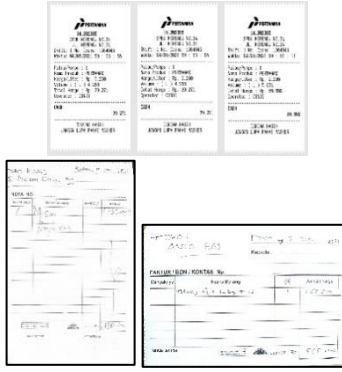


Medan..tgl...2...September..20..21
 Kepada : Bima...Miss...Tampubolon




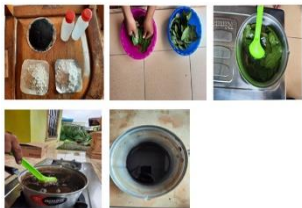
Barang² yang sudah dibeli
 tidak dapat dikembalikan !



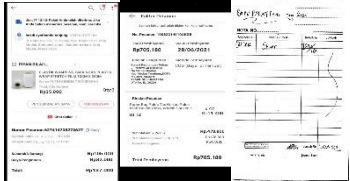

ITS
BACK TO NATURE


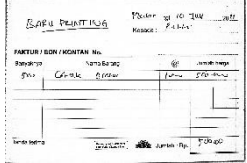



LOG BOOK



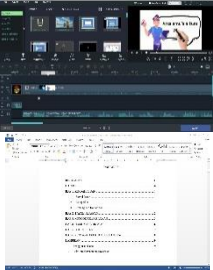

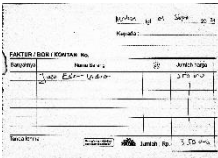

No	Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan	Capaian	Dok. Pendukung
1	06 Mei 2021	Adapun kegiatan yang hari ini kami lakukan adalah: 1. Menerima Informasi pengumuman proposal pendanaan 2021 PKM-K 2. Mengabari dosen pendamping untuk berdiskusi langkah selanjutnya dalam program ini	1%	
2	07 Mei 2021	Pertemuan sekaligus Silaturahmi 42 Tim PKM lolos pendanaan 2021 kemenristekdikti bersama perwakilan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melalui zoom meeting. Didalam pertemuan ini kami diberikan arahan untuk langkah selanjutnya dalam melakukan program PKM.	3%	
3	27 Mei 2021	Pada hari ini kami melakukan pendampingan yang pertama secara langsung dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat, dimana pada pertemuan ini kami meminta arahan dan masukan mulai dari pengisian logbook hingga pembuatan laporan kemajuan.	5%	
4	01 Jun 2021	Mengikuti bimbingan teknis pengisian logbook online yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara melalui lembaga Student Research and Creative Centre (SRCC).	7%	
5	04 Jun 2021	Pada hari ini kami menghadiri acara Pendampingan PKM PTMA yang diadakan seluruh Perguruan Tinggi Muhammadiyah	9%	
6	05 Jun 2021	Pada hari ini kegiatan kami melakukan diskusi bersama tim untuk merencanakan pembelian peralatan, dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk, dalam diskusi ini kami membuat list barang-barang yang akan dibeli.	11%	


7	07 Jun 2021	<p>Kegiatan hari ini kami membeli peralatan penunjang kegiatan produksi, yang terdiri dari : 1. Panci 3 buah @ Rp 55.000 = Rp 165.000 2. Sendok masak 5 buah @ Rp 28.500 = Rp 142.500 3. Mangkuk 4 buah @ Rp 5.000 = Rp 20.000 4. Serbet 4 buah @ Rp 7.500 = Rp 30.000 5. Gelas ukur 2 buah @ 34.000 = RP 68.000 6. Kompur gas 1 buah @ Rp 345.000 = Rp 345.000 7. Timbangan digital @ Rp. 165.000 = Rp 165.000 8. Saringan 3 buah @ Rp 22.000 = Rp 66.000 9. Biaya pencarian peralatan @ 127.328 = Rp 127.328 10. Biaya Parkir/Adm. = 10.000</p>	15%	 <p>The image shows three receipts from PT PERTAMINA for various kitchen items. Below the receipts are two photographs: one showing people in a market setting and another showing a collection of purchased items like pans, spoons, and bowls on a table.</p>
8	09 Jun 2021	<p>Kegiatan pembelian mesin penghalus dan tabung gas, dengan anggaran : 1. Mesin penghalus @ Rp. 1.150.000 = Rp. 1.150.000 2. Tabung gas @ Rp 565.000 = Rp 565.000 3. Biaya pencarian bahan @ Rp 128.542 = Rp 128.542</p>	19%	 <p>The image displays three receipts from PT PERTAMINA for a flour mill and gas cylinders. Below the receipts are two photographs: one showing a person at a counter and another showing a gas cylinder.</p>
9	11 Jun 2021	<p>Pada hari ini kami melakukan Pembelian bahan habis pakai, dengan anggaran : 1. Botol 100 ml 500 buah @ Rp 1.200 = Rp 600.000 2. Sedotan tinta 500 buah @ 1.500 = Rp 750.000 3. Biaya perjalanan @ 122.000 = Rp 122.000</p>	23%	 <p>The image shows two receipts from PT PERTAMINA for bottles and straws. Below the receipts is a photograph of a group of people standing in front of a building.</p>
10	15 Jun 2021	<p>Pembelian bahan pendukung produksi , dengan anggaran : 1. CMC 5 kotak/ 500 gram @ Rp 37.000 = Rp 185.000 2. Cuka 20 botol @ Rp 4.000 = Rp 80.000 3. Tepung maizena 20 kotak @ Rp 4.000 = Rp 80.000 4. Biaya perjalanan @ Rp 130.322 = Rp</p>	27%	 <p>The image shows three receipts from PT PERTAMINA for CMC, vinegar, and cornstarch. Below the receipts is a photograph of a group of people standing in front of a building.</p>

		130.322		
11	19 Jun 2021	Kami berdiskusi mengenai cara produksi pembuatan tinta spidol ITS Back To Nature. Dalam diskusi ini kami membahas mengenai : 1. Rencanakan dan menetapkan tempat survey pemasok bahan baku daun jambu biji dan tempurung kelapa 2. Tahap-tahap dalam pembuatan produk , agar dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan sesuai dengan yang di rencanakan .	29%	
12	23 Jun 2021	Kami pada hari ini melakukan pencarian sekaligus mencari supplier untuk tempurung kelapa. Untuk supplier tempurung kelapa ini kami melakukan kerjasama dan mengunjungi dari warung ke warung sekitar yang menjual kelapa sehingga tempurung kelapanya kami beli.	33%	
13	28 Jun 2021	Kegiatan 1. Pada hari ini Kami melakukan survey ke kebun jambu biji dan sekaligus membeli daun jambunya yang berlokasi di Jalan Tanjung Anom Kecamatan Pancur Batu. Pada saat survey ini kami memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan menjumpai pemilik kebun dan berkomunikasi untuk mengajak bekerjasama untuk pemasokan bahan baku daun jambu biji dalam pembuatan produk tinta spidol. Biaya yang dikeluarkan : 1. Biaya survei/pencarian bahan baku = 131.369 2. Biaya Daun Jambu Biji 1 Goni = 17.000 Kegiatan 2. kami menghadiri pendampingan pelaksanaan PKM 2021 yang diadakan DIKTI melalui zoom meeting	39%	
14	29 Jun 2021	Pada hari selasa ini kami langsung mengolah bahan baku yang telah dibeli menjadi produk tinta ITS Back to Nature. Dengan melakukan perebusan daun jambu biji, penyaringan, mengukur hingga pencampuran	45%	

		seluruh bahan-bahan yang diperlukan. Pada hari ini kami masih melakukan uji coba pembuatan produk.		
15	30 Jun 2021	Pada hari ini kami melakukan proses produksi dengan jumlah banyak yang nantinya akan kami pasarkan, agar bisa dipasarkan kami memutuskan setelah produksi kami memasukkan tinta yang telah jadi kedalam botol-botol kemasan. Dalam kegiatan hari ini kami tidak lupa untuk mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan mencuci tangan.	55%	
16	01 Jul 2021	Demi menunjang kinerja tim kami membeli kuota internet sebesar Rp 74.000/ bulan. Akumulasi harga 4 x Rp 74.000 = Rp 296.000	56%	
17	05 Jul 2021	Untuk aktivitas hari ini kami melakukan pembelian untuk melengkapi kegiatan pengemasan produk Tinta Spidol ITS Back To Nature. Adapun biaya yang dikeluarkan untuk bahan yang berkenaan packing/pengemasan yaitu : 1. Plastik Wrapping packing 3 buah @ 45.500 = 136.500 2. Papper bag 42 @ 14.500 = 609.000 3. Ongkos kirim/adm = 325.380 4. Stiker produk 500 lbr @ 2.000 = 1.000.000	65%	
18	06 Jul 2021	kami melakukan pemasangan label stiker di botol kemudian botol tersebut kami wrapping sehingga produk siap untuk dipasarkan	70%	

19	08 Jul 2021	Kegiatan pada hari ini kami melakukan diskusi video call melalui wa grub mengenai desain brosur yang akan kami gunakan dalam pemasaran produk	73%	
20	10 Jul 2021	Setelah kami melakukan desain brosur, kami memutuskan untuk mencetak brosur demi keberlangsungan promosi kami nantinya	74%	
21	12 Jul 2021	Pada hari ini kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan kegiatan promosi secara offline dengan mendatangi Toko Alat Tulis Kantor di sekitaran rumah dan menawarkan produk kami, selain itu kami tidak lupa juga tetap memperhatikan protokol kesehatan	76%	
22	31 Jul 2021	Pada bulan ini kami telah melakukan penjualan produk tinta ITS Back To Nature sebanyak 35 botol dengan pendapatan kotor sebesar Rp 420.000	78%	
23	01 Agt 2021	Pada hari ini kami melakukan kegiatan promosi secara offline kesekolah - sekolah yang melakukan kegiatan belajar mengajar secara blanded dengan memperhatikan protokol kesehatan dikarena saat ini masih pandemi	80%	

24	06 Agt 2021	Demi menunjanga kinerja tim kami membeli kuota internet sebesar Rp 74.000/ bulan. Akumulasi harga 4 x Rp 74.000 = Rp 296.000	81%	
25	09 Agt 2021	Pada hari ini kami melakukan kegiatan promosi kemasyarakatan di sekitar tempat produksi	84%	
26	30 Agt 2021	Pada hari ini kami menyelesaikan laporan kemajuan dan video animasi yang akan di upload ke youtube	87%	
27	31 Agt 2021	Pada bulan ini kami telah melakukan penjualan produk tinta ITS Back To Nature sebanyak 115 botol dengan pendapatan kotor sebesar Rp 1.380.000	90%	
28	01 Sep 2021	Pada hari ini kami melakukan penguploadan video animasi yang sebelumnya kami buat dengan menggunakan jasa edit	93%	
29	02 Sep 2021	Pada awal bulan ini kami telah melakukan penjualan produk tinta ITS Back To Nature sebanyak 8 botol dengan pendapatan kotor sebesar Rp 96.000	96%	

30	19 Sep 2021	Kegiatan terakhir ini kami melakukan penyelesaian laporan akhir serta logbook pada website simbelmawa	100%	
----	-------------	---	------	---



ITS Back To Nature

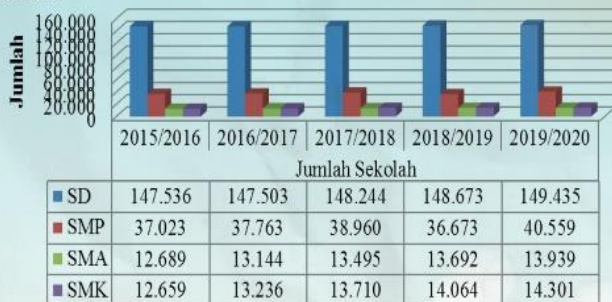
(Inovasi Tinta Spidol dalam pemanfaatan bahan alami sebagai bahan dasar)



Latar Belakang

Point 1

Adanya opportunity/peleuang mengenai penggunaan spidol yang meningkat dilihat dari data BPS mengenai jumlah sekolah di Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun



Point 2

Bahan baku yang mudah didapat di lingkungan sekitar.



Keunggulan

- ⊙ Terhindar dari Bahan Kimia
- ⊙ Membuka Lapangan Pekerjaan
- ⊙ Harga Lebih Terjangkau
- ⊙ Bahan Baku Mudah Dapat
- ⊙ Berasal dari bahan alami
- ⊙ Tidak berbau

Analisis ekonomi



Analisis BEP

Fixed Cost
Rp. 500.000

Price
Rp. 12.000/ unit

Variabel Cost
Rp 7.470/ unit

Tujuan

Menghasilkan produk inovasi tinta spidol berbahan dasar alami

Metode Pelaksanaan

1. Virtual-digital
2. Online
3. Offline



Hasil

Harga per botol Rp 12.000
isi 100 ml



Ucapan Terimakasih

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
SRCC (Students' Research And Creative Center) UMSU

Kesimpulan

Tinta ITS Back To Nature merupakan jenis tinta isi ulang spidol yang digunakan pada media papan tulis/white Board dimana produk ini berasal dari bahan alami yang ramah lingkungan dan tidak berbau. Produk ini memiliki prospek peluang yang besar untuk kedepannya dimana tinta spidol sangat dibutuhkan jika penggunaan tinta spidol yang banyak pula.

Tinta ITS Back To Nature ini memiliki kelebihan dimana bahan yang kami gunakan dalam pembuatan tinta spidol ini adalah bahan alami yang ramah lingkungan yaitu daun jambu biji dan tempurung kelapa.

Referensi

- Ariningsih, S., Hasrini, R. F., & Khoiriyah, A. (2021, February). Analisis Produk Santan Untuk Pengembangan Standar Nasional Produk Santan Indonesia. In *Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi* (Vol. 2020, pp. 231-238). Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. 2016-2020. Jumlah Pertumbuhan Sekolah Di Indonesia Berdasarkan Jenjang Pendidikan. Medan : Badan Pusat Statistik
- Desiyana, Lydia Septa. 2016. Uji Efektivitas Sediaan Gel Fraksi Etil Asetat Daun Jambu Biji (Psidium guajava Linn) Terhadap Penyembuhan Luka Terbuka Pada Mencit (Mus musculus). Universitas Syiah Kuala Darussalam – Banda Aceh, *Jurnal Natural* Vol. 16 No.2, 2016 ISSN 1141-8513
- Wijaya, D. S. (2020). Rebusan Daun Jambu Biji Terhadap Kadar Glukosa Darah. *Journal of Holistic and Traditional Medicine*, 4(04), 426-431.



Detail Kontak

itsbacktonature_

Tim :
Riski Dwi Sahputra (1805170081) | Muhammad Falhan (1805170083)
Bonari Pardomuan Pohan (1805170060) | Hezdi Syafnanda Tanjung (1805170073)
Dosen pendamping : Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Waktu Pelaksanaan
Juni – September 2021

ITS BACK TO NATURE (INOVASI TINTA SPIDOL DALAM PEMANFAATAN BAHAN ALAMI SEBAGAI BAHAN DASAR)

**Riski Dwi Sahputra¹, Muhammad Falhan², Bonari Pardomuan Pohan³, Hezdi Syafnanda
Tanjung⁴, Zulia Hanum^{5*}**

¹Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

²Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

³Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

⁴Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

⁵Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

*Corresponding author : zuliahhanum@umsu.ac.id

ABSTRAK

*Tinta spidol sangat penting dalam dunia pendidikan namun tinta spidol yang beredar dipasaran banyak yang mengandung zat kimia yang biasanya mengandung volatile organic compound yang dapat mengganggu pernapasan. Dengan adanya permasalahan ini memunculkan ide untuk memanfaatkan bahan alami dalam membuat tinta spidol inovasi yang memanfaatkan daun jambu biji dan tempurung kelapa sebagai bahan alami. Tanaman jambu biji (*Psidium guajava* l) mengandung zat antosianin dan tanin yang dapat digunakan sebagai bahan baku dalam pembuatan tinta spidol sedangkan tempurung kelapa dapat dijadikan sebagai bahan pewarna alami pembuatan tinta spidol. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini untuk menciptakan tinta spidol berbahan dasar alami dan meminimalisirkan penggunaan tinta spidol yang berbahan kimia. Untuk metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu menggunakan Virtual digital, offline, dan online. Adapun hasil dari kegiatan ini membuat inovasi produk tinta spidol berbahan dasar alami yang terbuat dari daun jambu biji dan tempurung kelapa. Berdasarkan kedua bahan ini menunjukkan bahwa daun jambu biji dan tempurung kelapa dapat dijadikan sebagai bahan dasar pembuatan tinta spidol.*

Kata kunci : Daun jambu biji, Tempurung kelapa, Tinta spidol, bahan alami

ABSTRACT

*Marker ink is very important in the world of education, but there are many markers on the market that contain chemicals which usually contain volatile organic compounds that can interfere with breathing. With this problem, the idea of using natural ingredients in making innovative marker ink that utilizes guava leaves and coconut shells as natural ingredients has emerged. The guava plant (*Psidium guajava* l) contains anthocyanins and tannins which can be used as raw materials for making marker ink, while coconut shell can be used as a natural dye for making marker ink. The purpose of this activity is to create natural-based marker ink and minimize the use of chemical-based marker ink. For the method used in this activity, namely using virtual digital, offline, and online. The results of this activity made an innovation of natural-based marker ink products made from guava leaves and coconut shells. Based on these two materials, it shows that guava leaves and coconut shells can be used as basic ingredients for making marker ink.*

Keywords : Guava leaves, Coconut shell, Marker ink, natural ingredients

PENDAHULUAN

Pada umumnya tinta spidol memiliki kandungan zat kimia *Volatile Organic Compound (VOC)* berupa *xylene* atau *dimetil benzena* yang dapat membahayakan kesehatan terutama pada pernapasan, pusing, dan sakit kepala (Rengganis A P, 2017; Ratnasari dkk, 2013). Selain itu dilihat dari data badan pusat Statistik mengenai pertumbuhan jumlah sekolah menurut jenjang pendidikan di Indonesia bahwa pertumbuhan tersebut mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Dengan pengamatan data tersebut menunjukkan bahwa peluang akan kebutuhan penggunaan spidol di dunia pendidikan itu akan meningkat serta dibarengi dengan kebutuhan akan tinta isi ulang spidol yang juga akan meningkat karena keduanya merupakan benda yang saling melengkapi.

Tabel Jumlah Pertumbuhan Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan,
Tahun Ajaran 2015/2016 dan 2019/2020

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah				
	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020
SD	147.536	147.503	148.244	148.673	149.435
SMP	37.023	37.763	38.960	36.673	40.559
SMA	12.689	13.144	13.495	13.692	13.939
SMK	12.659	13.236	13.710	14.064	14.301

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan acuan ini maka dari itu terciptanya buah pemikiran untuk membuat inovasi tinta spidol berbahan dasar alami yang memanfaatkan daun jambu biji dengan tempurung kelapa sebagai bahan baku pembuatan tinta bahan alami yang ramah lingkungan.

Jambu biji atau dengan nama latin *Psidium guajava L* merupakan tumbuhan yang mudah hidup berbagai lahan yang pada musim apapun dapat hidup dan berbuah. Hampir di seluruh daerah dapat ditemukan tanaman ini dan hampir semua orang mengenalnya. Namun, sampai saat ini belum banyak dimanfaatkan karena kurangnya informasi tentang penggunaan daun jambu biji (Maharani, 2013).

Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis sehingga tumbuhan jambu biji dengan mudah tumbuh di lingkungan sekitar kita (Wijaya, 2020). Namun pemanfaatan terutama pada daun jambu biji belum bernilai ekonomis. Karena pada umumnya masyarakat hanya menggunakan daun jambu biji sebagai obat tradisional, seperti mengobati penyakit diare, masuk angin, dan sebagainya.

Tempurung kelapa, seperti kita tahu juga indonesia merupakan negara yang kaya akan kuliner dimana penggunaan buah kelapa sangat banyak digunakan untuk pembuatan berbagai jenis masakan (Ariningsih, 2021). Tempurung kelapa dapat dikatakan sebagai limbah dari hasil pertanian yang manfaatnya masih minim padahal arang tempurung kelapa ini masih dapat diolah lagi menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomis tinggi (Gilar, 2013).

Dalam inovasi tinta bahan alami ini arang kelapa digunakan sebagai zat pewarna alami dengan cara melakukan pembakaran dan penggilingan tempurung kelapa hingga menjadi serbuk dan dapat digunakan sebagai zat pewarna hitam alami. Pada saat proses pembakaran tempurung kelapa juga memperhatikan dengan dampak yang ditimbulkan yaitu asap yang akan menyebabkan polusi pada lingkungan sekitar sehingga dibuat solusi dengan membakar menggunakan penutup kaleng yang dilubangi dengan filter udara yang kecil.

Berdasarkan dampak, peluang dan ketersediaan bahan baku di atas maka hadirnya inovasi tinta spidol dalam pemanfaatan bahan alami sebagai bahan dasar yang diberi nama ITS Back To Nature.

METODE

Kegiatan ini berlangsung dengan 3 metode yaitu *virtual-digital*, *online* dan *offline*. Ketiga metode ini diterapkan karena melihat dari situasi pandemik yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran virus yang begitu cepat. Virtual-digital merupakan kegiatan awal yang dilakukan dimana pada tahap ini melakukan berbagai diskusi bersama dengan dosen maupun teman-teman lainnya. Dalam metode ini dengan menerapkan perangkat komputer dan handphone sebagai alat penghubung diskusi yang dilengkapi dengan aplikasi zoom meeting.

Metode yang kedua adalah menggunakan kegiatan secara offline dimana seluruh kegiatan mulai dari kegiatan pengumpulan alat, bahan-bahan hingga pada tahap proses produksi yang dilengkapi mematuhi protokol kesehatan. Dalam proses pembuatan metode yang akan dilakukan adalah metode perebusan dan pembakaran. Perebusan ini dilakukan untuk mengekstrak daun jambu biji dengan cara merebus daun jambu biji dicampur dengan air. Pembakaran dilakukan untuk mengubah tempurung kelapa menjadi serbuk tempurung kelapa. Pembakaran dilakukan dengan cara menata tempurung kelapa ke dalam drum, di dalam drum diletakkan pipa, dimana pipa tersebut digunakan sebagai saluran pembuangan asap untuk meminimalisir asap yang keluar.

Alat yang digunakan yaitu kompor gas, panci, alat aduk, mesin penghalus, gelas takar, timbangan digital, dan saringan, Sedangkan untuk Bahan yang digunakan ekstrak daun jambu biji, serbuk tempurung kelapa, tepung maizena, CMC, cuka.

Timbang dan takar semua bahan yaitu ekstrak daun jambu biji, serbuk tempurung kelapa, tepung maizena, CMC, cuka.,kemudian campurkan semuanya setelah dicampur, dimasak sampai mengental.

Berikut dokumentasi pembuatan tinta spidol yang diawali dengan (1) pencucian daun jambu biji terlebih dahulu (2) melakukan perebusan dengan takaran air yang disesuaikan (3) dilakukan penyaringan dari hasil perebusan daun jambu biji yang memiliki air yang berubah menjadi kecoklatan. (4) setelah penyaringan masuk kepada

pencampuran bahan-bahan pendukung lainnya dan serbuk tempurung kelapa bakar. (5) kemudian dilakukan pemasakan kembali hingga mengental. Berikut dilampirkan gambar pada aspek produksi:



Pada aspek pemasaran dilakukan dengan menerapkan metode blended dimana pemasaran maupun penjualan melalui media sosial dan berjualan langsung menawarkan produk di lingkungan sekitar. Pada strategi ini dilakukan kegiatan promosi dan pengemasan melalui :

1. Media sosial ITS Back To Nature seperti *Instagram*, *facebook*, *shopee*, dan *whatsapp*.
2. Melakukan kegiatan promosi dengan melakukan penawaran toko Alat Tulis Kantor di seputaran kota medan.
3. Melakukan promosi di berbagai sekolah yang ada di seputaran kota medan dan serdang bedagai.
4. Promosi kepada masyarakat di lingkungan sekitar yang kira-kira membutuhkan tinta spidol dengan melihat profesi dari masyarakat itu sendiri.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang dicapai melalui berbagai evaluasi terhadap seluruh kegiatan produksi, maka dihasilkan berbagai formulasi-formulasi dalam pembuatan tinta spidol ITS Back To Nature . Formulasi ini dihasilkan melalui berbagai proses pengukuran maupun penimbangan dari aspek bahan-bahan yang digunakan baik itu bahan baku dan bahan pendukung, dalam proses ini bertujuan untuk menemukan kualitas terbaik dari produk tinta bahan alami yang dihasilkan.

Pada kegiatan ini telah diambil ekstrak daun jambu biji dengan menggunakan metode perebusan dan metode pembakaran tempurung kelapa untuk mengambil serbuk tempurung kelapa. Hal ini bertujuan untuk memanfaatkan daun jambu biji dan tempurung kelapa yang belum dimanfaatkan dengan optimal. Pemilihan metode perebusan karena untuk mengambil ekstrak daun jambu biji dan pemilihan metode pembakaran untuk mengambil serbuk tempurung kelapa. Keuntungan dari metode ini peralatannya sederhana dan mudah didapat. Perebusan dilakukan dengan cara mencampurkan daun jambu biji dengan air. Pembakaran dilakukan dengan cara membakar tempurung kelapa setelah terbakar, dihaluskan menggunakan mesin penghalus dan disaring agar menjadi serbuk tempurung kelapa. Berikut formula dan hasil dari pembuatan produk yang telah dilakukan:

Tabel 1. Komposisi Formula Tinta Spidol

No	Nama bahan	FORMULA		
		Basis/F1	FII	FIII
1	Ekstrak daun jambu biji	100 ml	100 ml	100 ml
2	Serbuk tempurung kelapa bakar	5 gr	7 gr	10 gr
3	Tepung maizena	1 gr	1 gr	1 gr
4	CMC	1 gr	1 gr	1 gr
5	Cuka	6 ml	6 ml	6 ml

Table 2. Hasil Pengamatan Tinta Spidol

Formula	Warna	Tekstur	Aroma
I	Hitam	Kental	Tidak berbau
II	Hitam	Kental	Tidak berbau
III	Hitam pekat	Kental	Tidak berbau

Dari kedua tabel diatas telah menggambarkan komponen dan hasil formula dari tiga kali percobaan dalam pembuatan produk ITS Back To Nature ini. Hal ini bertujuan untuk membandingkan dan mengevaluasi dalam pembuatan produk ITS Back To Nature agar memperoleh hasil yang diinginkan dan mampu bersaing di

pasaran. Setelah melakukan pengujian maka dilakukan penganalisisan *break even point* produk ini dan dilanjutkan dengan penjualan.

Produk ITS Back To Nature siap untuk dipasarkan dan diharapkan dapat menjadi produk inovasi tinta dengan bahan alami yang ramah lingkungan. Penjualan dilakukan ke berbagai objek utama yaitu sekolah-sekolah, toko alat tulis kantor, tempat-tempat bimbingan belajar serta ke berbagai media sosial.

Berikut analisis BEP yang dilakukan :

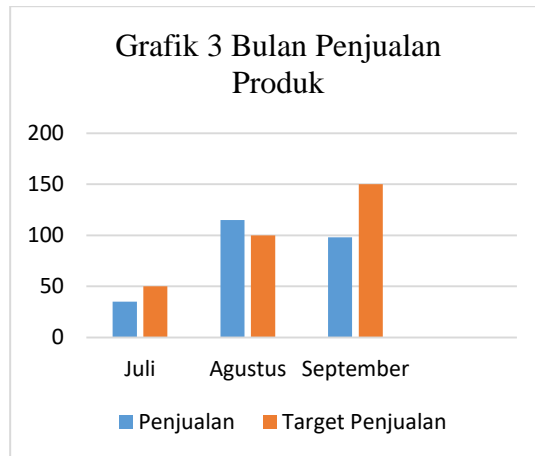
$$\begin{aligned} \text{Fixed Cost} &= \text{Rp. } 500.000 \\ \text{Price} &= \text{Rp. } 12.000/\text{ unit} \\ \text{Variabel Cost} &= \text{Rp } 7.470/\text{ unit} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BEP unit} &= \frac{\text{biaya tetap}}{\text{harga jual per unit}-\text{biaya variabel per unit}} \\ &= \frac{500.000}{12.000-7.470} = 111 \text{ botol} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{BEP rupiah} &= \frac{\text{biaya tetap}}{1-\frac{\text{biaya variabel per unit}}{\text{harga jual per unit}}} \\ &= \frac{500.000}{1-\frac{7.470}{12.000}} = \text{Rp. } 1.324.503 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pembuktian} &= \text{unit BEP} \quad \times \quad \text{Harga jual per unit} \\ &= 111 \quad \times \quad 12.000 \\ &= \text{Rp. } 1.320.000 \text{ (Hasil selisih dikarenakan} \\ &\quad \text{pembulatan)} \end{aligned}$$

Berikut merupakan grafik hasil penjualan yang telah dilakukan:



Berikut merupakan hasil penjualan yang dikelola ke dalam Cash Flow/Arus kas :

Uraian	Bulan		
	1	2	3
a. Sumber Dana (<i>in flow</i>)	8.700.000	420.000	1.800.000
b. Penggunaan Dana (<i>out flow</i>)	(8.700.000)	-	-
c. Arus kas bersih (<i>net flow=a-b</i>)	-	420.000	1.800.000
d. Keadaan kas Awal	420.000	1.380.000	96.000
e. Keadaan kas akhir (<i>c+d</i>)	420.000	1.800.000	1.896.000

KESIMPULAN

Tinta ITS Back To Nature merupakan jenis tinta isi ulang spidol yang digunakan pada media papan tulis/white Board dimana produk ini berasal dari bahan alami yang ramah lingkungan dan tidak berbau. Tinta ITS Back To Nature ini memiliki kelebihan dimana bahan yang digunakan dalam pembuatan tinta spidol ini adalah bahan alami yang ramah lingkungan yaitu daun jambu biji dan tempurung kelapa.

Produk ini dihasilkan untuk memberikan inovasi tinta spidol yang menggunakan bahan alami sebagai bahan dasar dan meminimalisir penggunaan tinta spidol yang menggunakan bahan kimia.

Berdasarkan berbagai percobaan formulasi-formulasi mengenai pembuatan produk tinta yang berbahan dasar alami yang berulang kali yang dilakukan maka diambil formulasi terbaik untuk memperoleh hasil kualitas tinta yang terbaik.

Kemudian dari hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun jambu biji (*Psidium guajava* L) dan serbuk tempurung kelapa sudah dibakar dapat dijadikan tinta spidol.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pelaksanaan kegiatan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang terlibat langsung hingga terciptanya dan terselesaikannya proses kegiatan ini. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi yang telah memberikan kami kesempatan melalui PKM Kewirausahaan pendanaan 2021
2. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Lembaga Students Research and Creative Centre UMSU
4. Ibu Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing

DAFTAR PUSTAKA

- A P Rengganis, A. Y. (2017). Pengaruh Variasi Konsentrasi Arang Ampas Kopi terhadap Sifat Fisika Tinta Spidol . *Jurnal MIPA 40 (2) (2017): 92-96, 92 - 96.*
- Ariningsih, S., Hasrini, R. F., & Khoiriyah, A. (2021, February). Analisis Produk Santan Untuk Pengembangan Standar Nasional Produk Santan Indonesia. In *Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi* (Vol. 2020, pp. 231-238). Badan Standardisasi Nasional.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. 2016-2020. *Jumlah Pertumbuhan Sekolah Di Indonesia Berdasarkan Jenjang Pendidikan*. Medan : Badan Pusat Statistik.
- Gilar S. Pambayun, R. Y. (2013). Pembuatan Karbon Aktif Dari Arang Tempurung Kelapa Dengan Aktivator $ZnCl_2$ Dan Na_2CO_3 Sebagai Adsorben . *Jurnal Teknik Pomits Vol. 2, No. 1.*
- Lucia Hermawati Rahayu, S. P. (2014). Potensi Sabut Dan Tempurung Kelapa Sebagai Adsorben Untuk Meregenerasi Minyak Jelantah. *Momentum, Vol. 10, No. 1, April 2014, 47 - 53.*
- Jubaedah, E. (2021). Analisis Break Even Point Dalam Perencanaan Laba (Studi Kasus PT Dirgantara Indonesia). *Jurnal Industri Elektro dan Penerbangan, 10(1).*
- Maharani, R. S. (2013). Pengaruh Pemberian Air Rebusan Daun Jambu Biji (*Psidium Guajava*) Terhadap Kadar Glukosa Darah Pada Penderita Diabetes Mellitus Tipe II Di Desa Leyangan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang . *Jurnal Keperawatan Medikal Bedah . Volume 1, No. 2, November 2013, 119 - 126.*
- Wijaya, D. S. (2020). Rebusan Daun Jambu Biji Terhadap Kadar Glukosa Darah. *Journal of Holistic and Traditional Medicine, 4(04), 426-431.*


REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202146946, 15 September 2021

Pencipta
 Nama : **Dr. Zalfa Hamam, SE., M.Si, Rizki Dwi Subputra dkk**
 Alamat : **Dusun VII, Bangsan Sari, Tanjung Morawa, Deli Selayang, SUMATERA UTARA, 20362**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta
 Nama : **Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**
 Alamat : **Jl. Kapten Mochtar Basri No. 3 Gedung Darul Il, Medan Timur, Medan, SUMATERA UTARA, 20238**
 Kewarganegaraan : **Indonesia**

Jenis Ciptaan : **Laporan Penelitian**
 Jada Ciptaan : **ITS Back To Nature (Inovasi Tinta Spindel Dalam Pemanfaatan Bahan Alam Sebagai Bahan Dasar)**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **17 Mei 2021, di Medan**

Jangka waktu perlindungan : **Bertindak selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman;**

Nomor pencatatan : **000272772**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
 Surat Pencatatan Hak Cipta atas produk Hak tersebut ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

 Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
 NIP. 196611011994031001



Disahkan:
 Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Dr. Zalfa Hamam, SE., M.Si	Dusun VII, Bangsan Sari, Tanjung Morawa
2	Rizki Dwi Subputra	Jl. Perwira II, Palo Bayan Bengkulu, Medan Timur
3	Muhammad Fakhri	Jl. Fase 1 Gg. Pribood V, Tanjung Sari, Medan Selayang
4	Bonari Pardomuan Pohan	Jl. Perintis Gg. Kenanga, Bantan, Medan Terbang
5	Herdi Syafwanda Tanjung	Jl. Patra Korpi, Deli Raya, T. Ri Pagan, Medan Deli





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

SERTIFIKAT

NOMOR : 6163/E2/KM.05.01/2021

Diberikan kepada

1805170081 RISKI DWI SAHPUTRA
1805170083 MUHAMMAD FALHAN
1805170060 BONARI PARDOMUAN POHAN
1805170073 HEZDI SYAFNANDA TANJUNG

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
sebagai

Peraih Pendanaan

Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Skema PKMK
**ITS Back To Nature (Inovasi Tinta Spidol dalam pemanfaatan bahan alami
sebagai bahan dasar)**

Jakarta, 17 Oktober 2021
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan



Aris Junaidi
NIP. 196306041989031022



Puspresnas
Pusat Prestasi Nasional

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
PUSAT PRESTASI NASIONAL

Sertifikat

Nomor 2631/J3/KM.02.13/2021

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Sekretariat Jenderal, Pusat Prestasi Nasional
memberikan Sertifikat kepada:

HEZDI SYAFNANDA TANJUNG
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Sebagai Anggota 3 di Skema PK Kewirausahaan

Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) tahun 2021

yang diselenggarakan pada tanggal 26 s.d. 30 Oktober 2021 oleh Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Universitas Sumatera Utara.



Jakarta, 1 November 2021

Plt. Kepala Pusat Prestasi Nasional



Asep Sukmayadi

NIP. 197206062006041001